

# LAKIN

BBPMP Provinsi Jawa Tengah

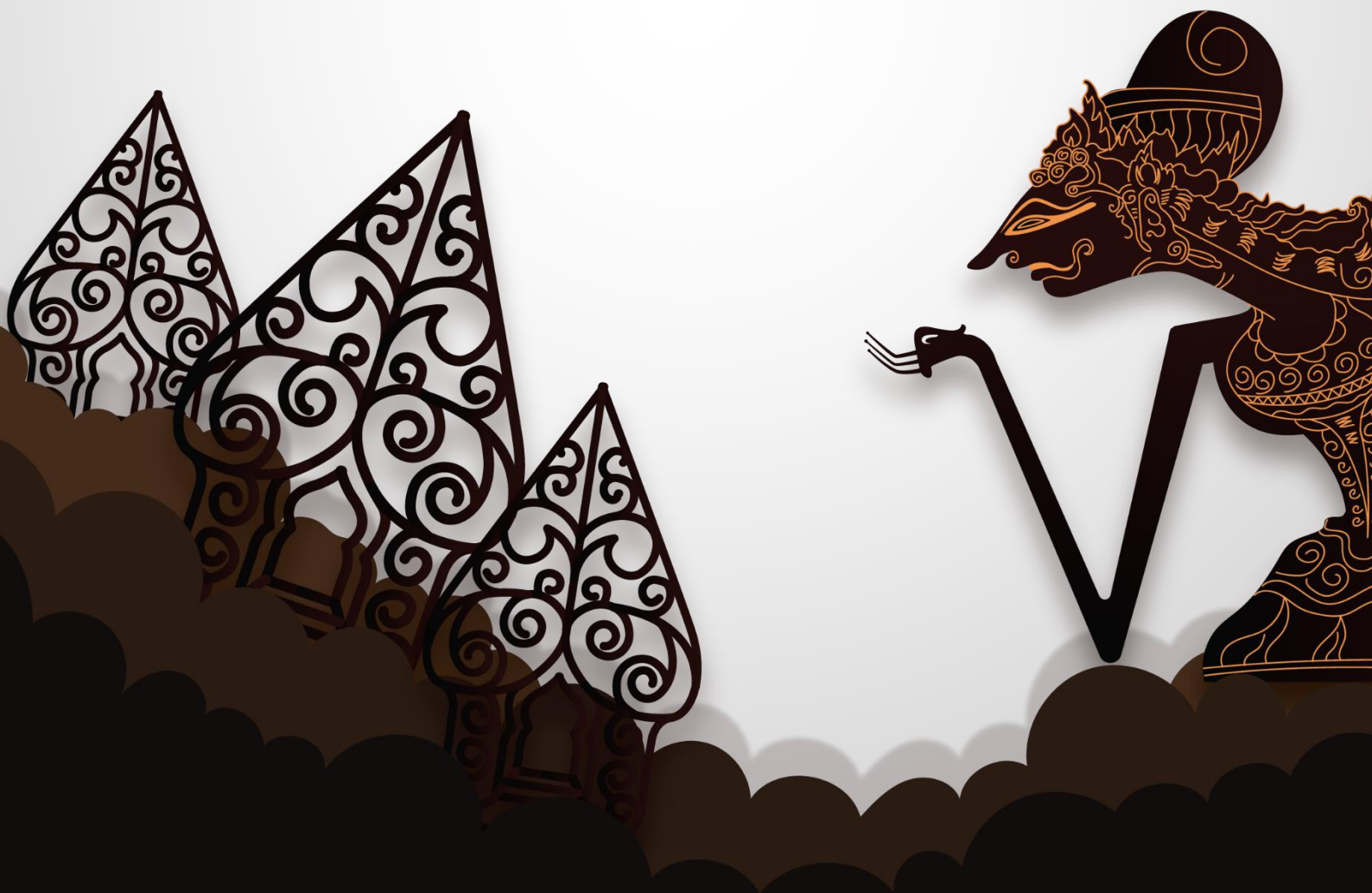
Laporan Kinerja Tahun 2023



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
BBPMP Provinsi Jawa Tengah  
@2024



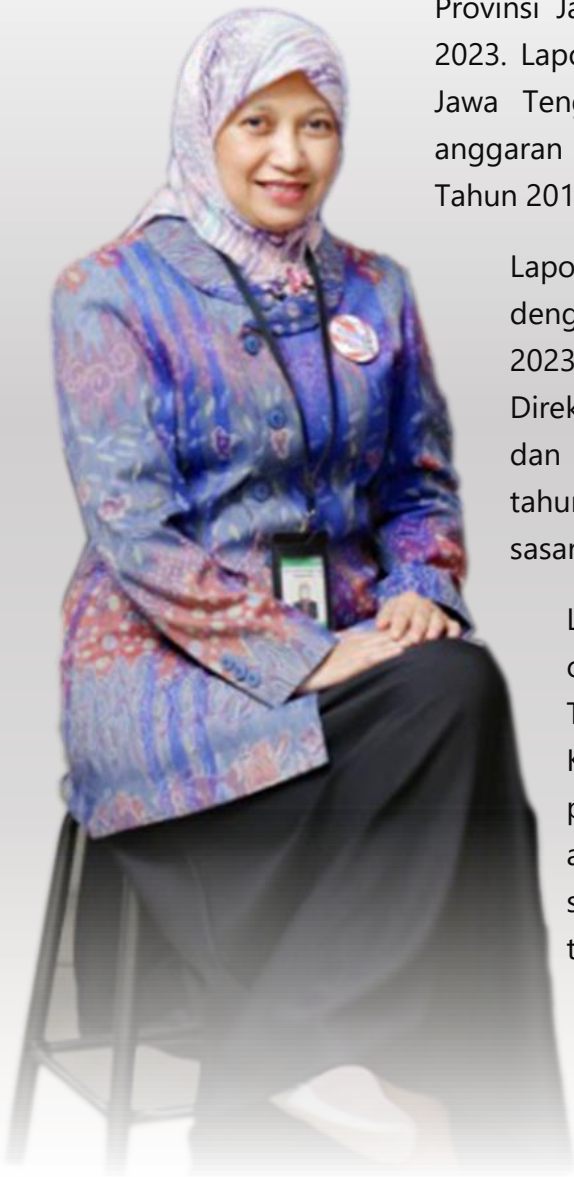
*Collaborative Governance*  
Untuk Peningkatan Mutu  
Pendidikan





# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2023. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BBPMP Provinsi Jawa Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan anggaran serta pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 antara Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, BBPMP Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan.

Laporan kinerja ini diharapkan menjadi media publikasi atas capaian kinerja yang dihasilkan BBPMP Provinsi Jawa Tengah ke masyarakat selama tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk pemantauan dan evaluasi pencapaian target Renstra, program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penjaminan mutu serta peningkatan kinerja BBPMP Provinsi Jawa Tengah di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja BBPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.



Samarang, 30 Januari 2024

Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah,

Ngraheni Triastuti, S.E., M.Si.

NIP 197303192000032002

# DAFTAR ISI

iii.  
Kata Pengantar



iv.  
Daftar Isi



vi.  
Ikhtisar Eksekutif



## 1 Bab I Pendahuluan

- 2 A. Gambaran Umum
- 5 B. Dasar Hukum
- 5 C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 7 D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

## 16 Bab II Perencanaan Kinerja

- 17 Ringkasan Renstra 2020-2024
- 20 Perjanjian Kinerja 2023

## 22 Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 23 A. Capaian Kinerja
- 57 B. Realisasi Anggaran
- 61 C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/ Collaborative*

## 74 Bab IV Penutup

### Lampiran

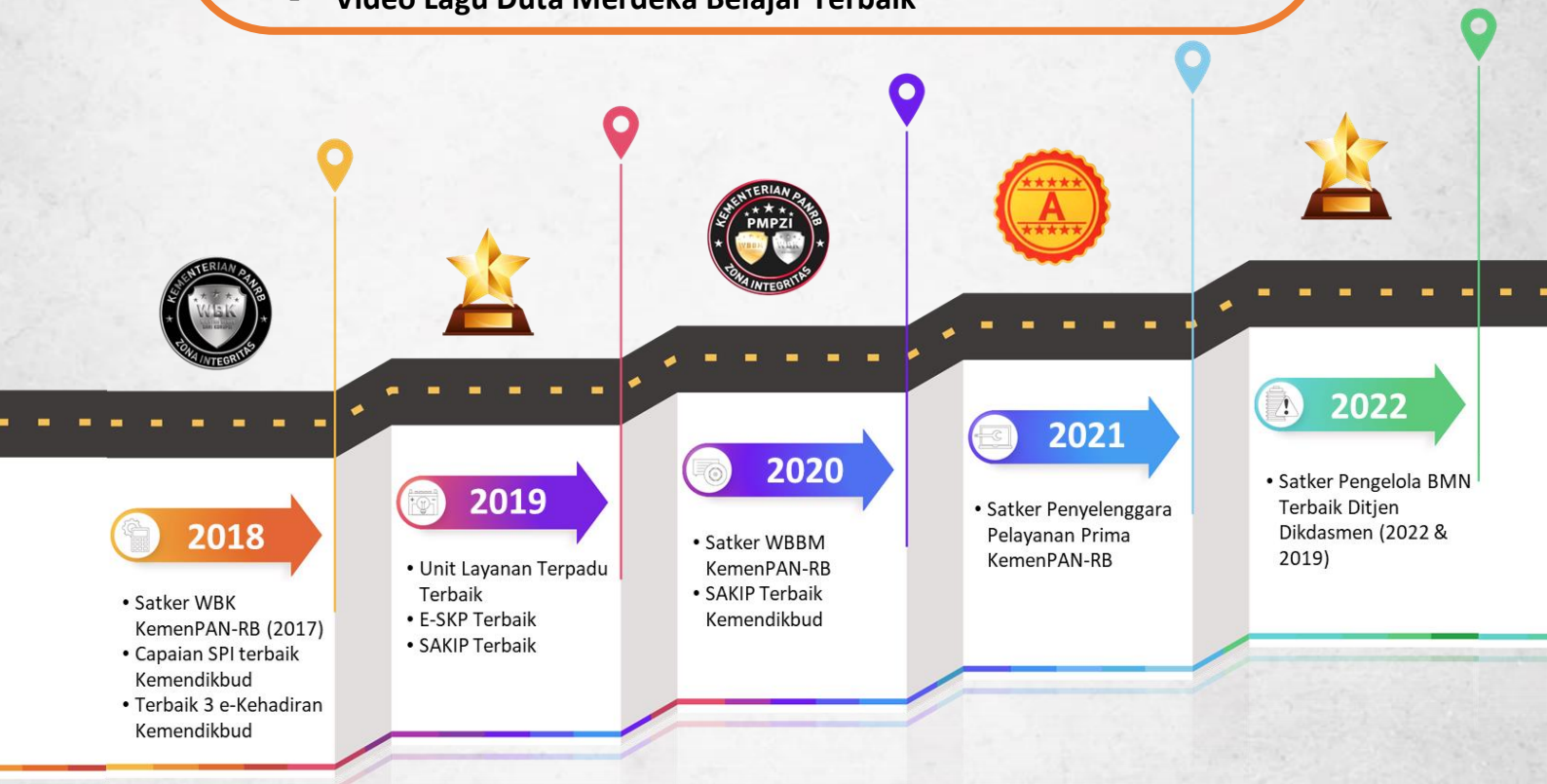
- 77 • Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pernyataan telah direviu

# PENGHARGAAN KAMI

Tahun 2023



1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan dari KemenPAN dan RB
2. Pengelolaan BMN terbaik Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen
3. Apresiasi Duta Merdeka Belajar, kategori:
  - Peningkatan Kapasitas SDM UPT Terbaik
  - Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi UPT Terbaik
  - Pencapaian Tujuan UPT Terbaik
  - Dampak Pemangku Kepentingan Terbaik
  - Video Lagu Duta Merdeka Belajar Terbaik



The background features a vibrant, abstract design. It consists of overlapping watercolor-style splashes in shades of teal, green, yellow, orange, red, and purple. Overlaid on these splashes are numerous thin, parallel diagonal lines that create a textured, grid-like effect. The overall composition is dynamic and colorful.

# Ikhtisar Eksekutif



# RINGKASAN CAPAIAN 2023

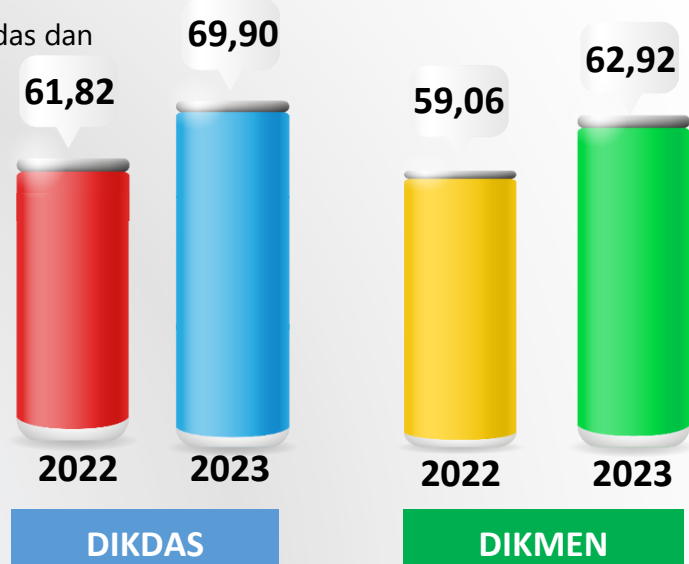
## Capaian Sasaran Kegiatan 01

Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari meningkatnya rapor pendidikan daerah untuk jenjang Dikdas dan Dikmen dan peningkatan jumlah sekolah terakreditasi untuk jenjang PAUD.

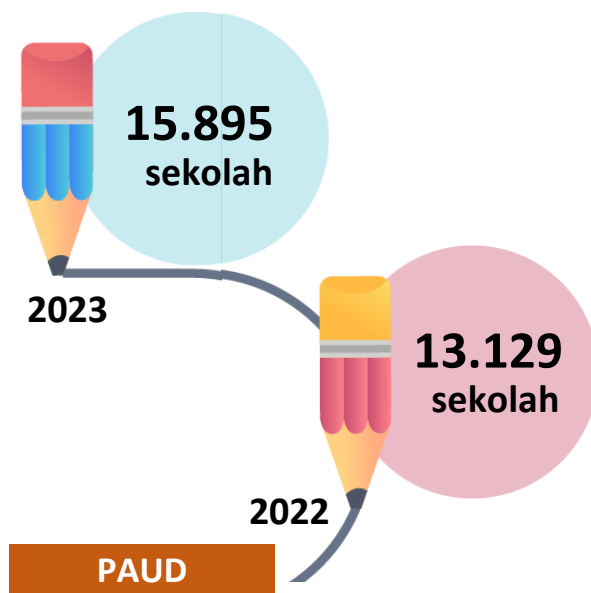
### Grafik Capaian

Mutu Pendidikan Jenjang Dikdas dan Dikmen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023



### Grafik Capaian

Jumlah PAUD Berakreditasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023

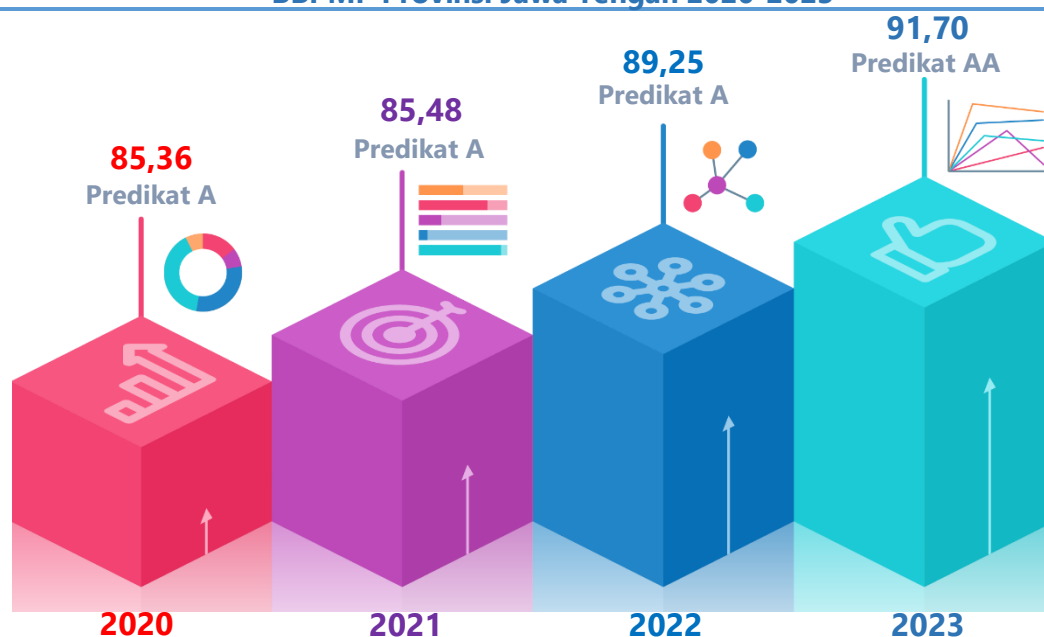


# Capaian Sasaran Kegiatan 02

## Meningkatnya Tata Kelola BBPMP Jawa Tengah

Dalam pengelolaan lembaga, BBPMP Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan perbaikan. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja.

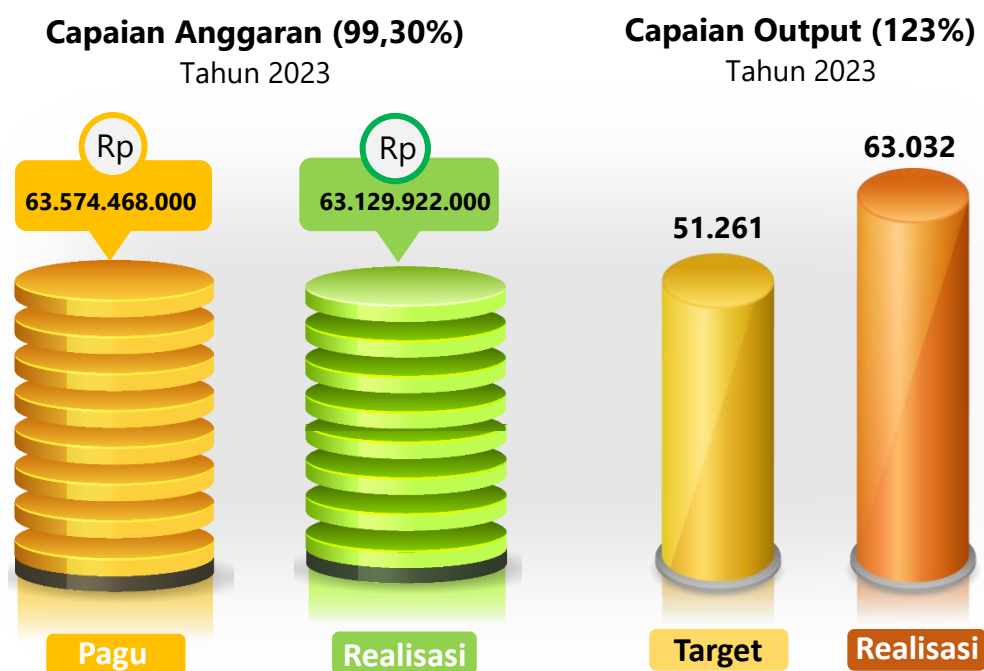
Nilai Akuntabilitas Kinerja  
BBPMP Provinsi Jawa Tengah 2020-2023



Dari 4 IKK yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kegiatan, **semua IKK realisasinya melebihi target (> 100%)**.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
<b>SK1.</b> Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<b>IKK 1.1</b> Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	3,14	160%
	<b>IKK 1.2</b> Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	97,22	324%
<b>SK2.</b> Meningkatnya tatakelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	<b>IKK 2.1</b> Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A	AA	>100%
	<b>IKK 2.2</b> Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	84	97,09	116%

Dilihat dari capaian output dan anggaran, berikut ringkasan realisasi keduanya.



Beberapa **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pada dua sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Jumlah satuan pendidikan yang besar serta geografi wilayah yang sulit dijangkau;
2. Sarana dan prasarana yang kurang dalam mendukung peningkatan literasi dan numerasi;
3. Masih terbatasnya kerjasama antara dinas pendidikan dengan mitra pembangunan dalam kegiatan peningkatan mutu;
4. Keterbatasan jumlah pengawas sekolah dan penilik dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada;
5. Kompetensi dan kualifikasi SDM PTK pada jenjang PAUD yang masih perlu ditingkatkan.

Berikut **upaya yang telah dilakukan** BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi kendala yang muncul:

1. Advokasi ke pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan komunitas belajar antar satuan pendidikan yang difokuskan pada:
  - perencanaan anggaran untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen;

- menggalang kerjasama dengan mitra pembangunan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen;
  - mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM);
2. Fasilitasi peningkatan mutu kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan dan komunitas belajar baik luring maupun daring;
  3. Pemberdayaan dan pendampingan kepada komunitas belajar dan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikmas, Dikdas dan Dikmen dalam optimalisasi perencanaan berbasis data;
  4. Supervisi mutu dan pendampingan kepada dinas pendidikan, Kombel dan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikmas, Dikdas dan Dikmen terkait dengan pemanfaatan *platform* sumber daya sekolah;
  5. Pendampingan kepada satuan pendidikan dan komunitas belajar jenjang PAUD, Dikmas, Dikdas dan Dikmen dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

# PERJALANAN KAMI



## 1977

Balai Penataran Guru  
(Kepmendikbud RI No 0116/O/1977)



## 2008-2022

1. LPMP (eselon II) (KepmendikbudRI No 66/2008)
2. LPMP (Permendikbud No 26 Tahun 2020)



## 2003

Lembaga Penjamin  
Mutu Pendidikan  
(Kepmendikbud  
RI No 087/O/2003)



## 2022

BBPMP  
(Permendikbudristek  
No 11 Tahun 2022)



## 2007

LPMP (eselon III)  
(Kepmendikbud RI No 07/O/2007)







01.

BAB I  
PENDAHULUAN



# A. GAMBARAN UMUM

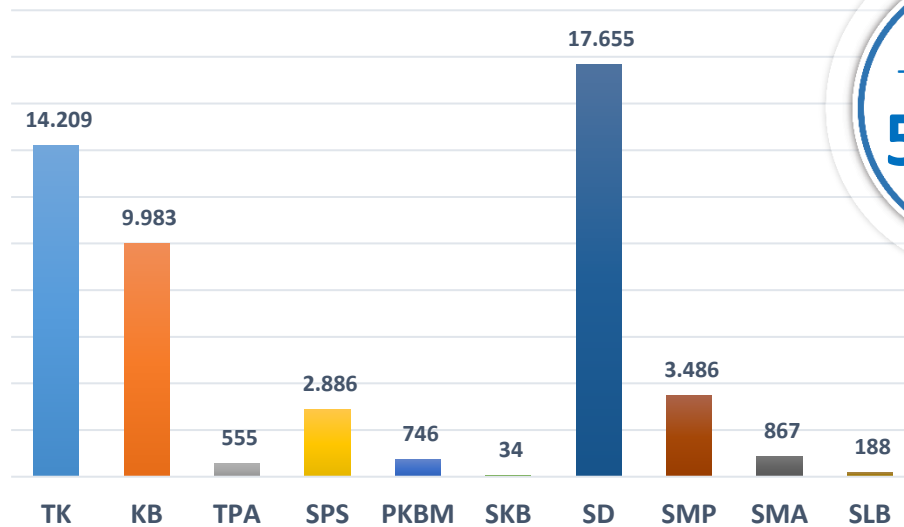
**Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)** Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek yang ada di Jawa Tengah. BBPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari lima BBPMP eselon II di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. BBPMP Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Banyumanik, Semarang. Sejak 8 September 2022 sampai sekarang BBPMP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.

BBPMP Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Unit kerja ini pada awalnya bernama Balai Penataran Guru (BPG) yang dibentuk pada tahun 1977, kemudian berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (2003), berubah kembali menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (2007). Sejak 29 Maret 2022 berubah menjadi BBPMP Provinsi Jawa Tengah (2022). BBPMP Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan hasil penggabungan dua UPT yaitu LPMP Provinsi Jawa Tengah dan PP PAUD Dikmas Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum BBPMP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pemetaan, supervisi, fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawab BBPMP Provinsi Jawa Tengah meliputi satuan pendidikan PAUD (TK, KB, TPA, SPS), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), SD, SMP, SMA, dan SLB. Wilayah kerja yang menjadi beban tugas BBPMP Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi Jawa Tengah, 13 Cabang Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah, dan 35 Kabupaten/Kota. Dengan jumlah total satuan pendidikan sesuai Dapodik per Desember 2023 sebanyak **50.609** satuan pendidikan, dengan rincian sebagaimana dalam grafik di bawah.

## Rincian Jumlah Satuan Pendidikan

yang menjadi tanggungjawab BBPMP Provinsi Jawa Tengah



Total Sekolah  
**50.609**

Sumber: DapoDikdas dan Dikmen, 7 Desember



## Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPMP Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 220 pegawai. Pegawai tersebut terdiri dari 2 jabatan struktural, 60 pegawai dengan jabatan fungsional Widyaprada, 128 pegawai dengan jabatan pelaksana dan 30 pegawai PPNPN.

# SUMBER DAYA MANUSIA



## BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH

\*Periode 31 Desember 2023

### JENIS KELAMIN



**51%**    **49%**

Jumlah pegawai ASN laki-laki 97 orang dan perempuan 93 orang

**220 orang**

Total Jumlah Pegawai BBPMP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari ASN dan PPNPN

### JENIS JABATAN



**2 Struktural**

- Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Bagian Umum



**27%**  
Jabatan Fungsional Widyaprada  
60 orang



**58%**  
Jabatan Pelaksana  
128 orang

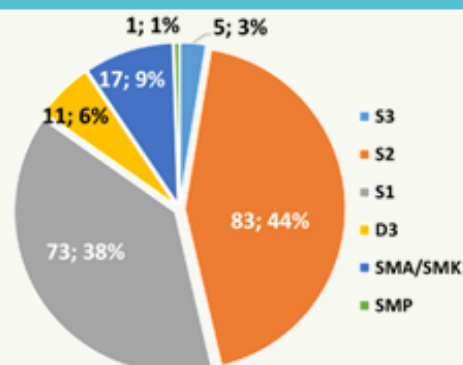


**14%**  
PPNPN  
30 orang

### JENIS PENDIDIKAN



Pendidikan	Jumlah Pegawai ASN
S3	5
S2	83
S1	73
D3	11
SMA/SMK	17
SMP	1



## B.

# DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbudristek Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
4. Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
5. Permendikbudristek Nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## C.

# TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI

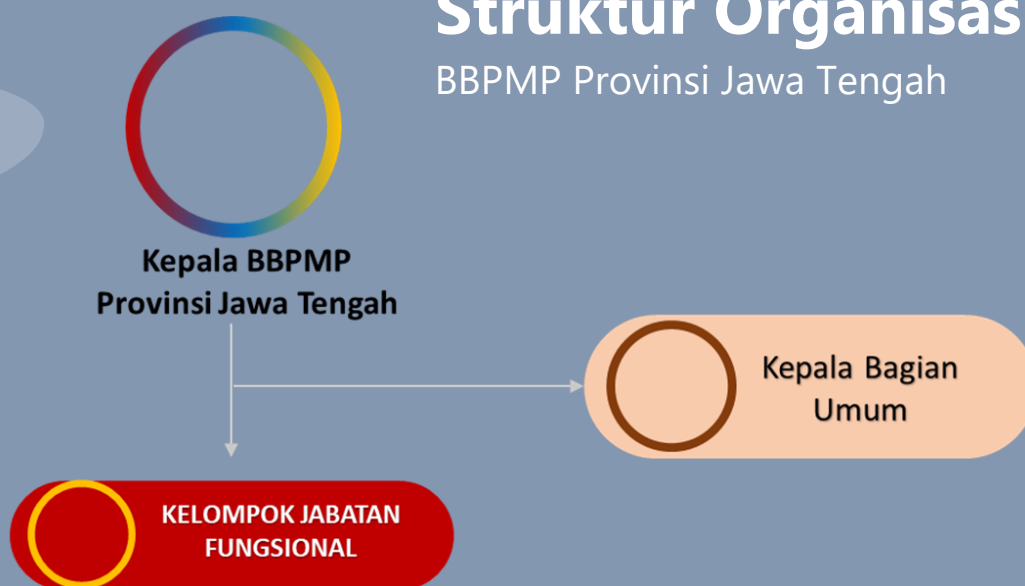
Tugas BBPMP Provinsi Jawa Tengah: melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Adapun fungsi BBPMP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi.

BBPMP Provinsi Jawa Tengah dipimpin seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon IIb, dibantu seorang Kepala Bagian Umum dengan jabatan structural eselon III/b, dan dibantu kelompok Jabatan Fungsional Tertentu serta Fungsional Umum.

## Struktur Organisasi

BBPMP Provinsi Jawa Tengah



# ISU-ISU STRATEGIS

## PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis dan peran strategis yang terkait dengan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah pada saat ini antara lain:

### Isu-isu Strategis

#### 1) **Belum Optimalnya Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter Siswa**

Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang penting bagi siswa. Saat ini kompetensi literasi dan numerasi juga menjadi salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Literasi dan numerasi sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan menggunakan angka-angka dalam berbagai konteks baik personal, sosial maupun profesional.

#### **Kemampuan Literasi**

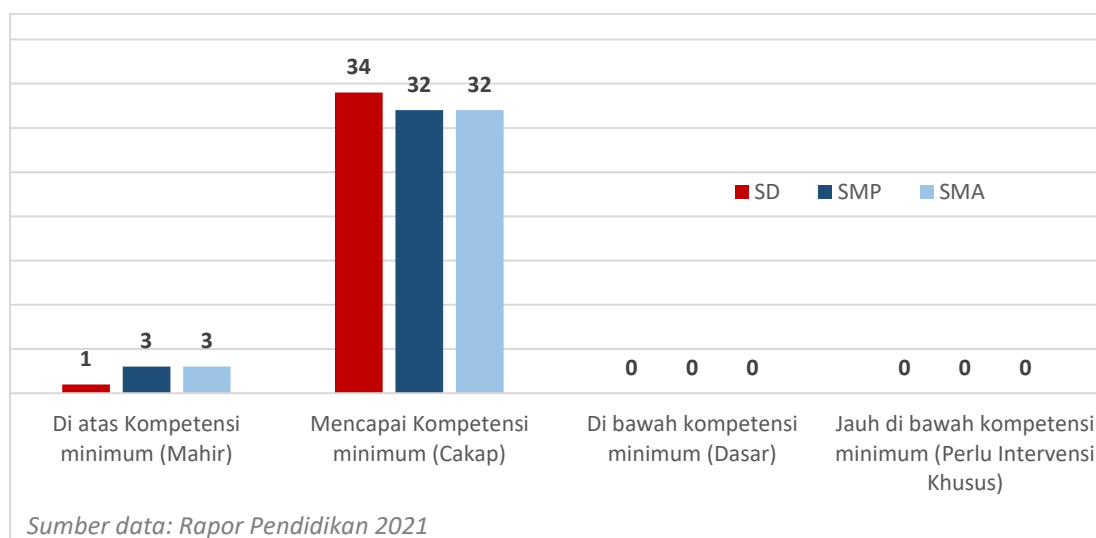
Pada jenjang SD, secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,81 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,67. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, 34 kab./kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), hanya 1 kota yang tingkat literasinya berada pada tingkat di atas kompetensi minimum (mahir), yaitu Kota Magelang.

Pada jenjang SMP, secara umum tingkat kemampuan literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,89 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,7. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, 32 kab./kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum, sedangkan 3 kota tingkat literasinya berada pada tingkat di atas kompetensi minimum (mahir), ketiga kota tersebut yaitu Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.

Sama seperti jenjang SD dan SMP, secara umum tingkat kemampuan literasi pada jenjang SMA juga berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,96 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-

rata nasional yang sebesar 1,8. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, 32 kab./kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum, sedangkan 3 kota tingkat literasinya berada pada tingkat di atas kompetensi minimum (mahir), yaitu Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.

**Capaian Literasi Provinsi Jawa Tengah**  
Per Jumlah Kabupaten/kota  
Total = 35 Kabupaten/kota



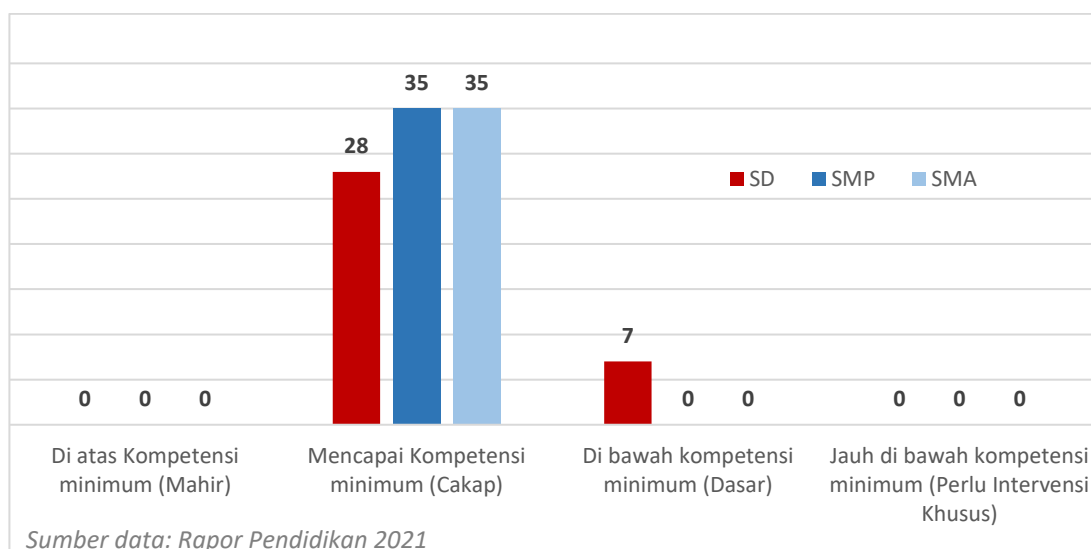
### Kemampuan Numerasi

Pada jenjang SD, secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,62 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,54. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, 28 kab./kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum, 7 kab./kota tingkat literasinya berada pada tingkat di bawah kompetensi minimum (dasar), ketujuh Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Kendal, Kab. Peralang, Kab. Purbalingga, Kab. Sragen, dan Kab. Tegal. Tidak ada satupun kab./kota yang berada pada tingkat di atas kompetensi minimum (mahir).

Pada jenjang SMP, secara umum tingkat kemampuan numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,74 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,64. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, semuanya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap).

Sama seperti jenjang SD dan SMP, secara umum tingkat kemampuan numerasi pada jenjang SMA berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,8 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,67. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, semuanya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap).

**Capaian Numerasi Provinsi Jawa Tengah**  
Per Jumlah Kabupaten/kota  
Total = 35 Kabupaten/kota



### Capaian Karakter

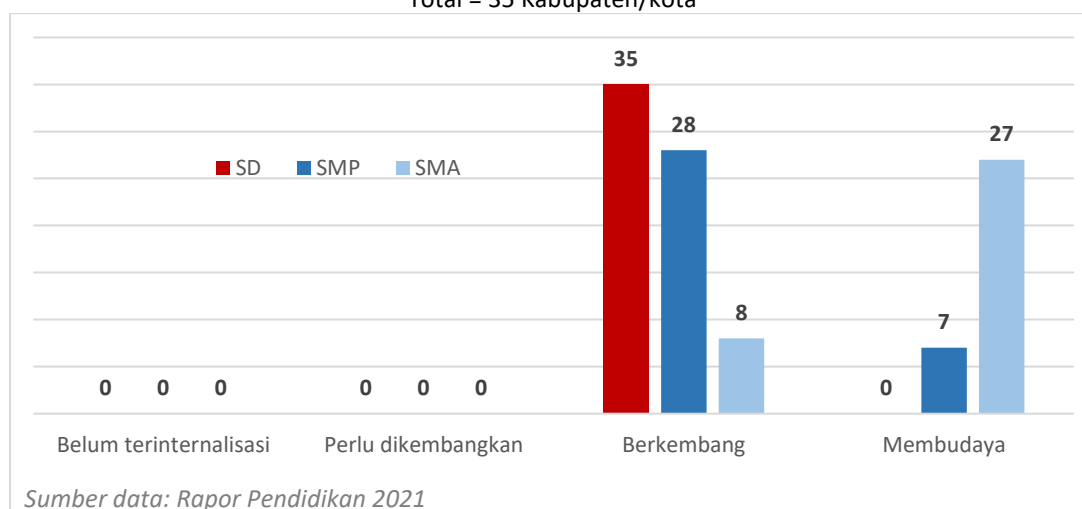
Pada jenjang SD, secara umum capaian tingkat karakternya berada pada tingkat berkembang, dengan nilai 2,13 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 2,08. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, semuanya berada pada tingkat berkembang.

Pada jenjang SMP, secara umum tingkat karakternya berada pada tingkat berkembang, dengan nilai 2,15 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 2,08. Dari 35 kab./kota yang ada di Jawa Tengah, 28 kab./kota tingkat karakternya berada pada tingkat berkembang, 7 kab./kota tingkat karakternya berada pada tingkat membudaya. Ketujuh Kabupaten/Kota tersebut adalah Kab. Klaten, Kab Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta

Berbeda dengan jenjang SD dan SMP, secara umum tingkat karakter pada jenjang SMA berada pada tingkat membudaya, dengan nilai 2,32 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 2,18. Dari 35

kab./kota yang ada di Jawa Tengah, 27 kab./kota tingkat karakternya berada pada tingkat membudaya, 8 kab./kota tingkat karakternya berada pada tingkat berkembang. Kedelapan kab./kota tersebut adalah Kab. Blora, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab. Pemalang, dan Kab. Rembang.

**Capaian Karakter Provinsi Jawa Tengah**  
Per Jumlah Kabupaten/kota  
Total = 35 Kabupaten/kota



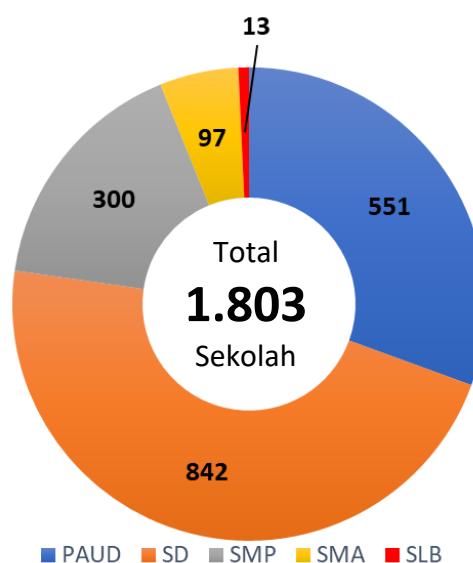
Data Rapor Pendidikan menjadi satu satunya sumber data bagi satuan pendidikan, dinas pendidikan dan BBPMP sebagai bahan refleksi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan. Rapor pendidikan agar dimanfaatkan dalam membuat perencanaan kegiatan dan kebijakan. Dengan perencanaan dan kebijakan yang tepat berdasarkan data, maka akan mendukung peningkatan kemampuan literasi, numerasi dan penguatan karakter siswa.

## 2) Belum Optimalnya Implementasi Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan salah satu program pada Kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek yang mendorong peningkatan kompetensi peserta didik yang berdampak pada peningkatan Rapor Pendidikan. PSP berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid.

Ada lima intervensi yang dilakukan pada sekolah penggerak diantaranya pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sekolah penggerak sejumlah 1.803 sekolah dari total sekolah 51.066 sekolah. Dengan kata lain baru sebanyak 4% sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan yang ada.



### Rekapitulasi Sekolah PSP Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2022

(Satuan pendidikan)

Jenjang	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total sekolah PSP	Total Jumlah Sekolah	%
PAUD	45	252	254	551	27.838	1,98%
SD	141	426	275	842	18.750	4,49%
SMP	50	106	144	300	3.430	8,75%
SMA	25	45	27	97	858	11,31%
SLB	4	7	2	13	190	6,84%
<b>Total</b>	<b>265</b>	<b>836</b>	<b>702</b>	<b>1 803</b>	<b>51.066</b>	<b>3,53%</b>

Masih sedikitnya jumlah sekolah pada masing-masing jenjang yang mengikuti program sekolah penggerak menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, Kemendikbudristek, dan BBPMP Provinsi Jawa Tengah agar tahun depan terjadi peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan lolos menjadi sekolah penggerak.

### 3) Belum Optimalnya Implementasi Kurikulum Merdeka

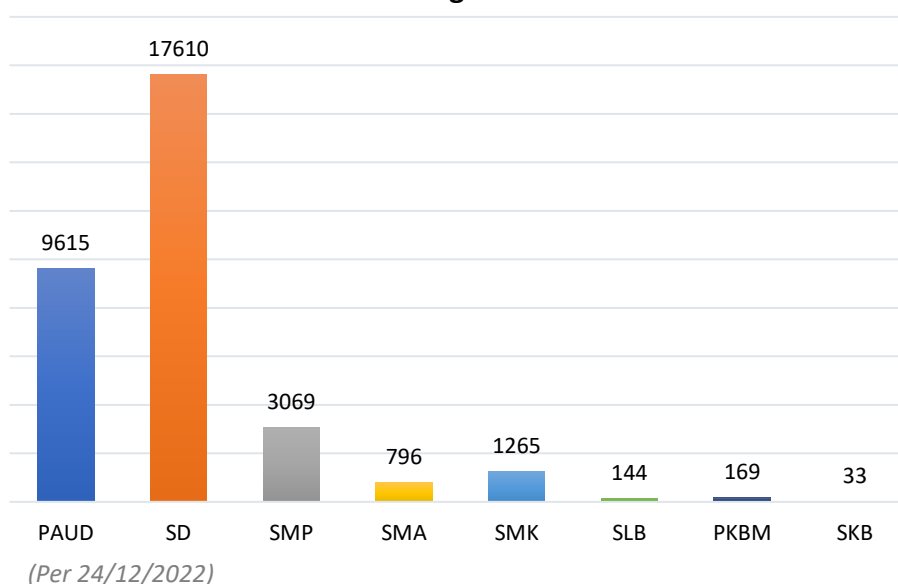
Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum *prototipe*) sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi

peserta didik. Ada tiga karakteristik utama yang dimiliki Kurikulum Merdeka untuk mendukung pemulihan pembelajaran yaitu:

- a) Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila;
- b) Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi;
- c) Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Dalam penerapannya, ada tiga opsi yang dapat dipilih sekolah sesuai kesiapan sekolah, tiga opsi tersebut antara lain opsi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Berdasarkan data publikasi per 24 Desember di <https://s.id/loginPMMjateng> untuk Provinsi Jawa Tengah 2022 ada sebanyak 32.701 sekolah yang terdaftar menjadi pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dengan rincian dalam grafik di bawah.

**Rekapitulasi Satuan Pendidikan IKM Secara Mandiri  
Provinsi Jawa Tengah tahun 2022**



salah satu strategi yang dipakai dalam Implementasi Kurikulum Merdeka adalah menggunakan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM). Di Provinsi Jawa Tengah ada sebanyak 99,02% sekolah yang telah *log in* ke PMM per 24 Desember 2022. Sedangkan untuk jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang *log in* ke PMM baru 80,05%. Data yang jumlah sekolah yang masuk dalam pelatihan mandiri ada sebanyak 97,37%. Data yang kurang mengembirakan

ada pada rerata penyelesaian topik, yaitu dengan rata-rata penyelesaian topik baru mencapai 66,66%.

Belum maksimalnya rata-rata penyelesaian topik pada PMM menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, Kemendikbudristek, dan BBPMP Provinsi Jawa Tengah agar tahun depan dapat mendorong terjadinya peningkatan persentase penyelesaian topik oleh pendidik sebagai bagian dari pelatihan mandiri.

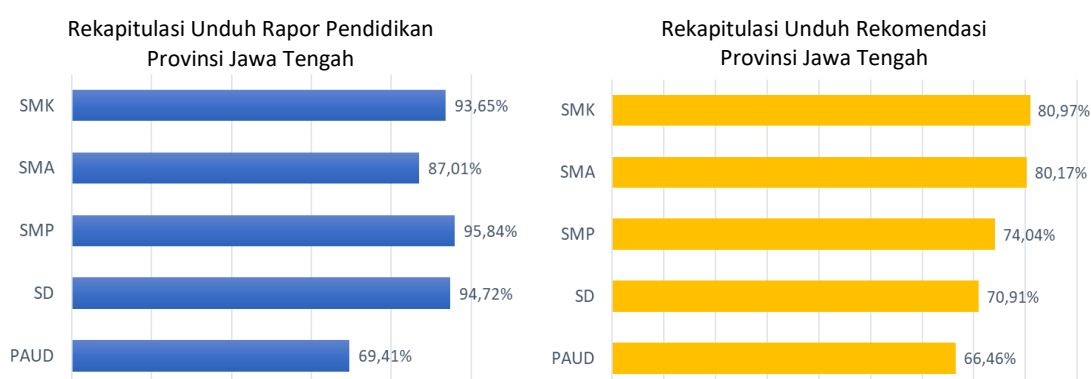
Selain pemanfaatan PMM yang belum optimal, implementasi pembelajaran paradigma baru dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA juga masih memerlukan pendampingan dalam implementasinya.

#### 4) **Belum Optimalnya Implementasi Perencanaan Berbasis Data**

Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan data dan fakta yang tersaji dalam rapor pendidikan.

Ada tiga langkah dalam perencanaan berbasis data mulai dari 1) mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam Rapor Pendidikan; 2) melakukan refleksi capaian; dan 3) melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan dan daerah.

Di Provinsi Jawa Tengah per tanggal 26 Desember 2022 ada sebanyak 88,13% satuan pendidikan yang telah mengunduh Rapor Pendidikan. sedangkan yang mengunduh rekomendasi baru mencapai 74,51%. Berikut rincian persentase capaian unduh Rapor Pendidikan dan rekomendasi per jenjang satuan pendidikan.



Data di atas menunjukkan belum maksimalnya satuan pendidikan yang mengunduh rekomendasi sebagaimana terdapat dalam aplikasi Rapor Pendidikan. Permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, Kemendikbudristek, dan BBPMP Provinsi Jawa Tengah agar satuan pendidikan melakukan unduh rapor pendidikan dan rekomendasinya. Tidak berhenti pada unduh saja, satuan pendidikan juga didorong untuk menggunakan dokumen rekomendasi yang telah diunduh tersebut sebagai acuan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah.

Permasalahan lain yang dikeluhkan satuan pendidikan dan pemerintah daerah adalah waktu publikasi rapor pendidikan yang lambat. Keterlambatan data yang ada tersebut membuat satuan pendidikan dan pemerintah daerah tidak menggunakan data dalam rapor pendidikan untuk menyusun rencana kegiatan karena data tersebut bisa saja sudah tidak relevan dan juga proses penyusunan rencana kegiatan sudah selesai dilakukan

#### **5) Belum Optimalnya Kualitas Data Pokok Pendidikan**

Dapodik memuat data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data substansi pendidikan dan data sarana prasarana yang berguna sebagai landasan Kemendikbudristek dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Kualitas Dapodik ditentukan oleh tiga indikator yaitu akurat, berkelanjutan dan terbarukan.

Capaian rapor Dapodik Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 97,70 pada tahun 2022. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 95,15. Sesuai data rapor mutu Dapodik tersebut, capaian kualitas Dapodik belum mencapai 100%. Untuk itu BBPMP Provinsi Jawa Tengah berupaya mendorong semua sekolah untuk melakukan *input* data secara akurat (wajar dan benar), melakukan sinkronisasi secara berkelanjutan, dan pemutakhiran data secara berkala.

# PERAN STRATEGIS BBPMP Provinsi Jawa Tengah

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon II, BBPMP Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran strategis baik dalam bidang pendidikan maupun dalam tataKelola kelembagaan. Peran strategis BBPMP Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

1. Mitra penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Miminal (SPM) Bidang pendidikan, 8 Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah;
2. Mitra penting bagi satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan karakter siswa serta pengelolaan manajemen sekolah yang akuntabel;
3. Mengawal pelaksanaan kebijakan Kementerian di Provinsi Jawa Tengah agar berjalan sukses;
4. Sebagai *role model* bagi UPT lain dalam pelaksanaan tata kelola kelembagaan.

The background features a vibrant, abstract design. It consists of overlapping watercolor-style splashes in shades of teal, green, yellow, orange, red, and purple. Overlaid on these splashes are numerous thin, parallel diagonal lines that create a textured, grid-like effect. The overall composition is dynamic and colorful.

02.

BAB II  
PERENCANAAN  
KINERJA



## VISI



BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.



## MISI

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

## TUJUAN STRATEGIS

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2024
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	75
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BBPMP Provinsi Jawa Tengah	Predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah	A

Untuk mencapai dua tujuan strategis tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja. Sasaran tersebut menjadi target yang akan dicapai pada setiap tahunnya.

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	SK1 Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<b>IKK1.1</b> Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya <b>IKK1.2</b> Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BBPMP Provinsi Jawa Tengah	SK2 Meningkatkan tata kelola BBPMP Jawa Tengah	<b>IKK2.1</b> Predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah <b>IKK2.2</b> Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BBPMP Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya ditetapkan tahapan pencapaian sasaran kegiatan tiap tahun untuk periode Renstra 2020-2024.

#### Target Kinerja IKK Periode 2020-2021 (Periode LPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET (%)	
	2020	2021
<b>SK1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>		
IKK1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimal 75	26,5	27,4
IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	5

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET (%)	
	2020	2021
IKK1.3 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	95,2

### SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik

IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah	A	A
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81	82

### Target Kinerja IKK Periode 2022-2024 (Periode BBPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET (%)		
	2022	2023	2024
<b>SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>			
<b>IKK1.1</b> Persentase satuan pendidikan (PAUDDikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98	1,96	3,92
<b>IKK1.2</b> Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	30	35
<b>SK2. Meningkatnya tata kelola BBPMP Jawa Tengah</b>			
<b>IKK2.1</b> Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A	A	A
<b>IKK2.2</b> Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	83	84	85

BBPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan satu kali penyesuaian dokumen perjanjian kinerja di tahun 2023. Berikut ringkasan dokumen Perjanjian Kinerja BBPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

**2023****PK Awal**

BBPMP Provinsi Jawa Tengah



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<b>IKK1.1</b> Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
	<b>IKK 1.2</b> Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
SK2. Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	<b>IKK2.1</b> Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A
	<b>IKK2.2</b> Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	84

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 45.229.709.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 34.090.211.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 79.319.920.000</b>

Perjanjian Kinerja BBPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan adanya **perubahan pagu anggaran di tahun 2023, perubahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian program prioritas** dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan rapor pendidikan daerah, peningkatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan.

**2023****PK Revisi**

BBPMP Provinsi Jawa Tengah



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
SK1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<b>IKK1.1</b> Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
	<b>IKK 1.2</b> Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
SK2. Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	<b>IKK2.1</b> Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A
	<b>IKK2.2</b> Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	84

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 38.183.606.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 25.390.860.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 63.574.468.000</b>



03.

**BAB III  
AKUNTABILITAS  
KINERJA**



**A.**

# CAPAIAN KINERJA



Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, BBPMP Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja. Berikut tingkat ketercapaiannya selama tahun 2023.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
<b>SK1.</b> Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<b>IKK 1.1</b> Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	3,14	160%
	<b>IKK 1.2</b> Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	97,22	324%
<b>SK2.</b> Meningkatnya tatakelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	<b>IKK 2.1</b> Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	A	AA	>100%
	<b>IKK 2.2</b> Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	84	97,09	116%

Sumber data: <https://spasikita.kemdikbud.go.id/>

# Sasaran Kegiatan 01

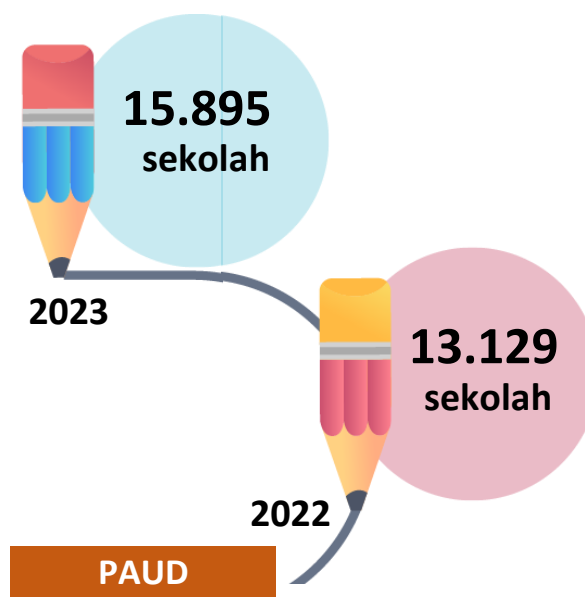
## Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari meningkatnya rapor pendidikan daerah atau indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah. Rapor pendidikan daerah diukur dari hasil pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), data akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional, dan data angka partisipasi sekolah dari Badan Pusat Statistik.

Pada jenjang PAUD, peningkatan mutunya diukur dari jumlah sekolah PAUD yang telah memperoleh akreditasi. Pada tahun 2023 jumlah PAUD yang berakreditasi sebanyak 15.895 sekolah, naik 2.766 dari tahun 2022 yang sebesar 13.129 sekolah.

### GRAFIK CAPAIAN

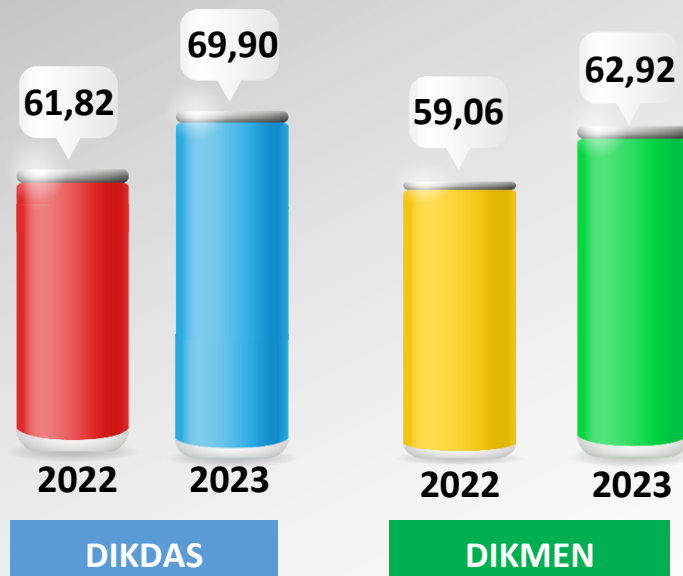
Jumlah PAUD berakreditasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023



Berbeda dengan jenjang PAUD, peningkatan mutu daerah pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah diukur dari indeks rapor pendidikan atau indeks standar pelayanan minimal. Pada tahun 2023, rata-rata indeks rapor pendidikan Provinsi Jawa Tengah jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami kenaikan. Rata-rata indeks rapor pendidikan jenjang pendidikan dasar Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 69,90 meningkat 8,08 poin dari tahun 2022 yang sebesar 61,82. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, rata-rata indeks rapor pendidikan tahun 2023 sebesar 62,92 meningkat 3,86 poin dari tahun 2022 yang sebesar 59,06.

# GRAFIK CAPAIAN

Rata-Rata Indeks Rapor Pendidikan Jenjang Dikdas dan Dikmen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023



Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut di atas didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan yaitu IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya, dan IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Berikut tingkat capaian IKK 1.1 dan IKK 1.2 beserta analisis ketercapaiannya.

## Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

**Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**

	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	0,98	1,8	184%
2023	1,96	3,14	160%
Akhir Periode Renstra (2024)	3,92	3,14	80%

Indikator Kinerja 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya adalah indikator kinerja yang digunakan BBPMP untuk mengetahui seberapa banyak jumlah satuan pendidikan PAUD yang mengalami peningkatan mutu pembelajaran. Sesuai definisi operasional perhitungan IKK yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, perhitungan dilakukan dengan membandingkan persentase satuan pendidikan PAUD yang meningkat mutu pembelajaran di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Data diperoleh berdasarkan hasil survei lingkungan belajar pada jenjang PAUD. Adapun rumus perhitungan IKK 1.1 adalah **[Jumlah satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar meningkat] / [Jumlah satuan PAUD dan Dikmas di Jawa Tengah] X 100%**. Satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah persentase. Tipe perhitungan yang digunakan non kumulatif yang diukur secara tahunan.

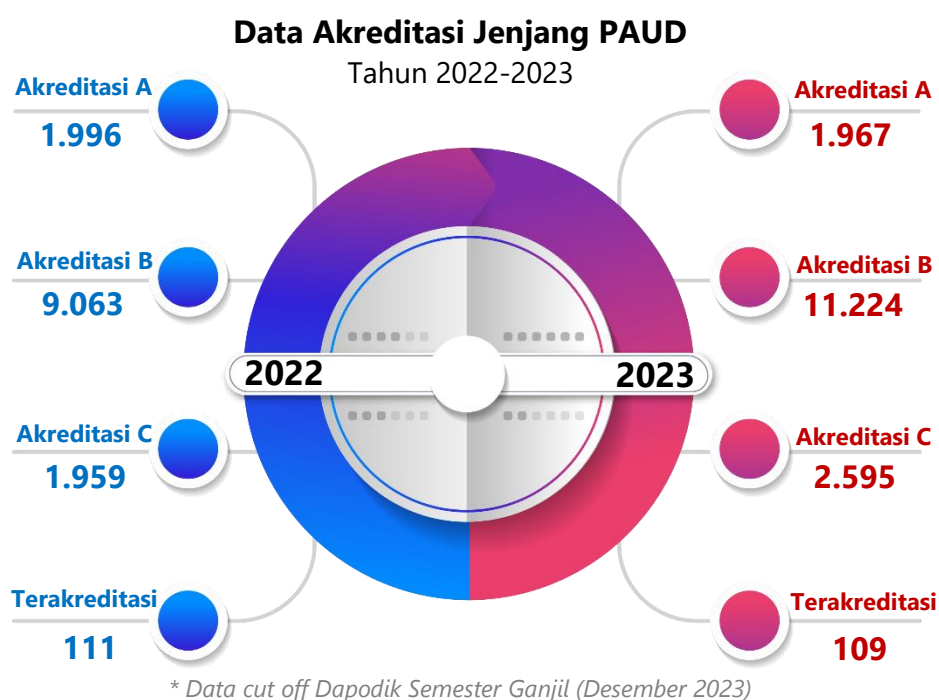
Pada tahun 2023, perhitungan satuan pendidikan yang meningkat mutu pembelajarannya pada jenjang PAUD masih menggunakan data akreditasi. Masih digunakannya data akreditasi untuk pengukuran IKK 1.1 dikarenakan rapor pendidikan untuk jenjang PAUD belum ada. Belum tersedianya rapor pendidikan jenjang PAUD disebabkan pelaksanaan survei lingkungan belajar kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD baru dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2023, dan sampai laporan kinerja ini diselesaikan, rapor pendidikan tersebut belum dipublikasikan.

Data akreditasi yang digunakan untuk menghitung capaian IKK 1.1 diperoleh dari aplikasi Dapodik *cut off* Semester ganjil (Desember) tahun 2023. Akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD PNF) dilakukan dalam rangka mengukur seberapa jauh penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di satuan pendidikan. Dari delapan standar tersebut, mutu pembelajaran masuk pada standar ketiga yaitu standar proses.

Berdasarkan data capaian pada tabel capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK 1.1 "Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya" capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 1,96% (542 satuan pendidikan PAUD) berhasil terealisasi sebesar 3,14% (868 satuan pendidikan PAUD) dengan persentase capaian sebesar 160%. Sesuai Dapodik jumlah total satuan PAUD di tahun 2023 sebanyak 27.642 satuan pendidikan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2022 ada sebanyak 1,8% satuan pendidikan jenjang PAUD yang telah berakreditasi, maka pada tahun 2023 jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang memperoleh akreditasi sebanyak 3,14% terdapat kenaikan sebanyak 1,34%.

Pada tahun 2022, satuan pendidikan Jenjang PAUD yang berakreditasi baik akreditasi A, B, C, dan terakreditasi sebanyak 13,129 satuan pendidikan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi 15.895 satuan pendidikan, terjadi peningkatan satuan yang berakreditasi sebanyak 2.766 satuan pendidikan. Berikut data akreditasi jenjang PAUD tahun 2022 dan tahun 2023.



Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, persentase capaian IKK 1.1 baru mencapai 80%, yaitu dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra sebesar 3.92%, baru terealisasi sebesar 3,14% di tahun 2023 (lihat tabel di atas). Dari data tersebut dapat disimpulkan perlu sebanyak 0,78% lagi satuan pendidikan jenjang PAUD yang perlu ditingkatkan mutu pembelajarannya di tahun 2024 agar target yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.

Capaian IKK 1.1 tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2020, hal ini dikarenakan IKK 1.1 merupakan IKK yang baru ada mulai tahun 2022. Terjadinya perubahan IKK tersebut disebabkan ada penyesuaian Renstra Kemendikbudristek pada Bulan Maret tahun 2022 akibat adanya restrukturisasi organisasi dan evaluasi indikator kinerja di Kemendikbudristek.

Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional, capaian IKK 1.1 lebih tinggi dari tersebut. Capaian IKK 1.1 secara nasional adalah sebesar 2,13, sedangkan capaian di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,14. Capaian Provinsi Jawa Tengah 1,01 lebih tinggi dari capaian nasional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKK1.1 diantaranya: 1) pelaksanaan kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas belajar yang ada di jenjang PAUD; 2) pelaksanaan bimbingan teknis penyelarasan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi komunitas belajar jenjang PAUD; 3) advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah secara asimetris dan berkelanjutan; 4) pelaksanaan pembinaan perencanaan berbasis data; 5) pelaksanaan pembinaan AN kesetaraan dan survei lingkungan belajar di jenjang PAUD; dan 6) bimbingan teknis pemanfaatan *platform* Sumber Daya Sekolah (SDS) kepada komunitas belajar jenjang PAUD.

### Kegiatan Pendukung

Realisasi ketercapaian IKK 1.1 yang melebihi target tersebut dimungkinkan karena adanya kontribusi atau dukungan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1.1.

Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka	4800	4813	100,3%
Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional	105	105	100%
Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah	27050	27050	100%
Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak	551	551	100%

Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data	27983	26600	95%
Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan	1585	1585	100%

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut di atas, hasil yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PTK di satuan pendidikan jenjang PAUD dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas;
- b. Satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas mengetahui pelaksanaan kurikulum merdeka secara baik mulai dari asesmen awal, dan pembelajaran berdiferensiasi;
- c. Meningkatnya kemampuan TIK bagi komunitas belajar jenjang PAUD dan Dikmas;
- d. Satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas mengimplementasikan *platform* sumber daya sekolah seperti aplikasi ARKAS, Siplah, dan rapor pendidikan secara baik untuk pengelolaan sekolah;
- e. Satuan pendidikan mampu menyusun rencana kegiatan sekolah berdasarkan pada evaluasi diri sekolah.

### Permasalahan

Meskipun target yang ditetapkan pada tahun 2023 telah tercapai, namun masih dijumpai hambatan/kendala dan permasalahan dalam pencapaian target IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dinas pendidikan serta satuan pendidikan jenjang PAUD untuk peningkatan mutu pembelajaran;
2. Belum seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD pada tahun 2022 diikutsertakan dalam kegiatan Asesmen Nasional, sehingga belum memiliki rapor pendidikan tahun 2023;
3. Sebagian besar satuan pendidikan jenjang PAUD memiliki keterbatasan jumlah PTK, sehingga dalam pengerjaan evaluasi diri mandiri mengalami kesulitan;
4. Keterbatasan jumlah penilik PAUD dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan PAUD yang ada;
5. Sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung proses pembelajaran;

6. Kompetensi dan kualifikasi SDM PTK jenjang PAUD yang masih perlu ditingkatkan;
7. Masih terbatasnya kerjasama antara dinas pendidikan dengan mitra pembangunan daerah dalam kegiatan peningkatan mutu.

Beberapa **langkah antisipasi yang telah dilakukan** BBPMP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Advokasi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan komunitas belajar antar satuan pendidikan yang difokuskan pada:
  - Perencanaan anggaran untuk mendukung peningkatan mutu jenjang PAUD;
  - Menggalang kerjasama dengan mitra pembangunan dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran PAUD.
2. Pemberdayaan komunitas belajar jenjang PAUD dalam optimalisasi perencanaan berbasis data;
3. Supervisi mutu dan pendampingan kepada dinas, komunitas belajar, dan satuan pendidikan jenjang PAUD.



Seorang guru di TK Pembina Bukateja, Purbalingga sedang memimpin anak didiknya melakukan senam sehat dalam rangka implementasi Kampanye Sekolah Sehat

Untuk menjaga agar target IKK 1.1 tetap tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan permasalahan yang muncul, BBPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan **rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun depan**. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagian besar masih sama seperti tahun sebelumnya, hanya ada sedikit penambahan atau penyempurnaan, berikut rencana yang akan dilakukan tersebut:

1. Advokasi kepada legislatif dan eksekutif di daerah untuk keberlanjutan implementasi kebijakan merdeka belajar;
2. Pendampingan pemanfaatan anggaran kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan PAUD agar penggunaannya lebih tepat sasaran untuk mendukung peningkatan rapor pendidikan;
3. Sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah, komunitas belajar, dan satuan Pendidikan jenjang PAUD terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar;
4. *Coaching clinic* dan pendampingan kepada satuan pendidikan dan komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan pemanfaatan *platform* sumber daya sekolah;
5. Advokasi kepada dinas pendidikan untuk pemenuhan jumlah penilik PAUD dan pemenuhan sarana prasarana pembelajaran;
7. Pendampingan dan fasilitasi kepada satuan pendidikan dan komunitas belajar, PAUD terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran, dan pengelolaan satuan pendidikan;
8. advokasi kepada dinas pendidikan dalam rangka peningkatan kerjasama dengan mitra pembangunan di daerah.

## Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

**Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**

	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	25	89	356%
2023	30	97,22	324%
Akhir Periode Renstra (2024)	35	97,22	278%

Indikator Kinerja 1.2 “Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)” adalah indikator kinerja yang digunakan BBPMP untuk mengetahui seberapa banyak pemerintah daerah di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan rapor pendidikan atau indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan persentase satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meningkat rapor pendidikannya pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber data pengukuran IKK 1.2 berasal dari rapor pendidikan daerah yang dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan dan Sekretariat Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Rapor pendidikan merupakan gambaran kondisi pendidikan di masing-masing daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan. Sumber data rapor pendidikan berasal dari hasil pelaksanaan Asesmen Nasional, Dapodik, BPS dan BAN. Rapor pendidikan daerah tersebut diperoleh dari pengukuran atas 6 indikator prioritas, yang meliputi kemampuan literasi, kemampuan numerasi, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, iklim inklusifitas, dan angka partisipasi sekolah.

Rumus perhitungan IKK 1.2 adalah **[Jumlah satuan dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat] / [Jumlah satuan Dikdas dan Dikmen di Provinsi Jawa Tengah] X 100%**. Setelah mendapatkan angka tersebut, baru direkapitulasi kembali berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota agar mendapatkan angka persentase Provinsi, Kabupaten/Kota yang meningkat. Satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah persentase. Tipe perhitungan menggunakan non kumulatif yang diukur secara tahunan.

Dari data capaian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK 1.2 “Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)” untuk tahun 2023 capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 30% berhasil terealisasi sebesar 97,22% dengan persentase capaian sebesar 324%. Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, BBPMP Provinsi Jawa Tengah menargetkan sebanyak 30% atau 11 daerah yang meningkat rapor pendidikannya. Dari target tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Tengah berhasil merealisasikan sebanyak 97,22% atau 35 daerah yang meningkat rapor pendidikannya. Satu daerah yang belum meningkat rapor pendidikannya adalah Kabupaten Grobogan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dilihat dari makin meningkatnya rata-rata indeks rapor pendidikan. Pada tahun 2022, rata-rata indeks rapor pendidikan di Provinsi Jawa Tengah jenjang pendidikan dasar sebesar 61,82, meningkat menjadi 69,90 pada tahun 2023, terjadi peningkatan 8,08 poin. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah, rata-rata indeks rapor pendidikan pada tahun 2022 sebesar 59,06, meningkat menjadi 62,92 pada tahun 2023, terjadi peningkatan 3,86 poin.

Berikut capaian indeks rapor pendidikan prov/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023.

### Data Capaian Rapor Pendidikan/Indeks SPM

Tahun 2022-2023

No	Prov/Kab/Kota	Indeks Rapor Pendidikan/SPM		
		2022	2023	Label Indeks
1	KOTA MAGELANG	70,66	80,40	TUNTAS MADYA
2	KOTA SALATIGA	66,63	76,06	TUNTAS PRATAMA
3	KAB. MAGELANG	63,14	74,60	TUNTAS PRATAMA
4	KAB. WONOSOBO	62,2	74,36	TUNTAS PRATAMA
5	KAB. BOYOLALI	60,74	74,30	TUNTAS PRATAMA
6	KAB. BATANG	63,34	74,28	TUNTAS PRATAMA
7	KAB. SEMARANG	62,76	73,77	TUNTAS PRATAMA
8	KAB. WONOGIRI	61,68	73,23	TUNTAS PRATAMA
9	KOTA SEMARANG	63,56	72,90	TUNTAS PRATAMA
10	KOTA SURAKARTA	66,72	72,76	TUNTAS PRATAMA
11	KAB. PURWOREJO	62,81	72,76	TUNTAS PRATAMA
12	KAB. BANJARNEGARA	61,29	72,28	TUNTAS PRATAMA
13	KAB. KUDUS	62,55	72,21	TUNTAS PRATAMA
14	KAB. SUKOHARJO	63,41	71,67	TUNTAS PRATAMA
15	KAB. TEMANGGUNG	61	71,49	TUNTAS PRATAMA
16	KAB. KLATEN	62,85	71,25	TUNTAS PRATAMA
17	KAB. PATI	61,26	71,19	TUNTAS PRATAMA
18	KOTA TEGAL	64,45	70,70	TUNTAS PRATAMA
19	KAB. KEBUMEN	61,55	70,66	TUNTAS PRATAMA
20	KAB. SRAGEN	60,79	69,94	TUNTAS PRATAMA
21	KAB. JEPARA	61,33	69,08	TUNTAS MUDA
22	KOTA PEKALONGAN	61,7	68,84	TUNTAS MUDA
23	KAB. CILACAP	59,41	68,79	TUNTAS MUDA
24	KAB. REMBANG	61,78	68,70	TUNTAS MUDA

No	Prov/Kab/Kota	Indeks Rapor Pendidikan/SPM		
		2022	2023	Label Indeks
25	KAB. KARANGANYAR	61,34	67,94	TUNTAS MUDA
26	KAB. BLORA	60,23	67,61	TUNTAS MUDA
27	KAB. PURBALINGGA	60,61	67,18	TUNTAS MUDA
28	KAB. BANYUMAS	61,06	66,44	TUNTAS MUDA
29	KAB. DEMAK	61,44	65,75	TUNTAS MUDA
30	KAB. PEKALONGAN	59,12	65,51	TUNTAS MUDA
31	KAB. KENDAL	58,57	65,04	TUNTAS MUDA
32	KAB. TEGAL	58,68	63,94	TUNTAS MUDA
33	KAB. BREBES	58,14	61,96	TUNTAS MUDA
34	KAB. PEMALANG	57,45	59,88	BELUM TUNTAS
35	KAB. GROBOGAN	59,3	58,93	BELUM TUNTAS
	<b>RATA-RATA KAB/KOTA (Dikdas)</b>	<b>61,82</b>	<b>69,90</b>	<b>TUNTAS PRATAMA</b>
<b>36</b>	<b>PROV. JAWA TENGAH RATA-RATA PROV. (Dikmen)</b>	<b>59,06</b>	<b>62,92</b>	<b>TUNTAS MUDA</b>

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, persentase capaian IKK 1.2 sudah mencapai 278%, yaitu dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra sebesar 35%, berhasil terealisasi sebesar 97,22% di tahun 2023 (lihat tabel di atas). Dari data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa target capaian untuk periode akhir Renstra telah tercapai, bahkan telah melebihi target.

Berdasarkan data capaian realisasi yang sangat tinggi tersebut beberapa evaluasi yang dilakukan BBPMP Provinsi Jawa Tengah antara lain akan melakukan penyesuaian pada target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024-nya. Target dalam perjanjian kinerja tahun 2024 akan ditetapkan minimal sama seperti capaian kinerja tahun 2023. BBPMP Provinsi Jawa Tengah tidak akan melakukan perubahan target kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Renstra karena hal itu akan menyebabkan ketidaksiharasan dengan Renstra unit kerja atasannya yaitu Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen dan Renstra Kemendikbudristek. Selain itu, penentuan target dalam Renstra merupakan kewenangan unit kerja atasannya yaitu Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen dan Kemendikbudristek.

Capaian IKK 1.2 tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2020, hal ini dikarenakan IKK 1.2 merupakan IKK yang baru ada mulai tahun 2022. Terjadinya perubahan IKK tersebut disebabkan ada penyesuaian Renstra Kemendikbudristek pada Bulan Maret tahun 2022 akibat adanya restrukturisasi organisasi dan evaluasi indikator kinerja di Kemendikbudristek.

Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional, capaian IKK 1.2 di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi capaiannya. Secara nasional, capaian IKK 1.2 "Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)" sebesar 65,40%, yaitu dari total 552 pemerintah daerah (prov./kab./kota) sebanyak 361 pemerintah daerah berhasil meningkat rapor pendidikannya. Sedangkan capaian IKK 1.2 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,22%. Capaian di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi 31,82% dari capaian nasional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKK1.2 diantaranya: 1) pelaksanaan kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas belajar di jenjang Dikdas dan Dikmen; 2) pelaksanaan pembinaan kurikulum merdeka dan bimbingan teknis penyelarasan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi komunitas belajar jenjang Dikdasmen; 3) optimalisasi peran guru penggerak untuk melakukan pendampingan ke satuan pendidikan; 4) pendampingan pelaksanaan P5 kepada komunitas belajar; 5) pelaksanaan pembinaan sekolah penggerak; 6) supervisi penguatan literasi dan numerasi; 7) bimtek pemulihan dan transformasi pembelajaran; 8) pendampingan kombel untuk penguatan literasi; 9) advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah secara asimetris dan berkelanjutan; 10) pelaksanaan pembinaan perencanaan berbasis data; 11) pelaksanaan pembinaan AN di jenjang Dikdas dan Dikmen; dan 12) bimbingan teknis pemanfaatan *platform* Sumber Daya Sekolah (SDS) kepada komunitas belajar jenjang Dikdas dan Dikmen.

### **Kegiatan Pendukung**

Realisasi ketercapaian IKK 1.2 yang melebihi target tersebut dikarenakan adanya kontribusi atau dukungan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1.2.

Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka	10.800	12.976	120%
Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional	739	739	100%
Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah	24.577	24.577	100%
Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak	1253	1817	145%
Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data	23278	24100	103%
Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan	2537	2537	100%
Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah	8894	8894	100%

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut di atas, hasil yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mampu menerapkan pembelajaran dan pengelolaan lingkungan sekolah yang meningkatkan literasi dan numerasi
- Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PTK di satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen dalam pelaksanaan pembelajaran;
- Meningkatnya kemampuan TIK bagi komunitas belajar jenjang Dikdas dan Dikmen;
- Satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen mengetahui pelaksanaan kurikulum merdeka secara baik mulai dari asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi, dan implementasi P5;
- Meningkatnya jumlah satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen yang mampu mengelola BOSP secara baik;
- Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan *platform* sumber daya sekolah secara baik seperti aplikasi ARKAS, Siplah, dan rapor pendidikan secara baik dalam pengelolaan sekolah;
- Satuan pendidikan mampu menyusun rencana kegiatan sekolah berdasarkan pada evaluasi diri sekolah;
- Meningkatnya jumlah mitra pembangunan yang bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sekolah.

23/11/2023. Sebuah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala sekolah sedang merancang pembuatan pojok baca. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan pendampingan kombel antar sekolah untuk peningkatan literasi di TPK SDN 6 Kebondalem-Pemalang yang difasilitasi BBPMP Prov. Jawa Tengah



### **Permasalahan**

Dalam upaya pencapaian target IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan target 30%, masih dijumpai beberapa hambatan/kendala dan permasalahan, diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran dinas pendidikan serta satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen untuk peningkatan literasi dan numerasi;
2. Jumlah satuan pendidikan yang besar serta geografi wilayah yang sulit dijangkau;
3. Sarana dan prasarana yang kurang dalam mendukung peningkatan literasi dan numerasi;
4. Masih terbatasnya kerjasama antara dinas pendidikan dengan mitra pembangunan dalam kegiatan peningkatan mutu;
5. Keterbatasan jumlah pengawas sekolah dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada.

Beberapa **langkah antisipasi yang telah dilakukan BBPMP Provinsi Jawa Tengah** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Advokasi ke pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan komunitas belajar antar satuan pendidikan yang difokuskan pada:
  - perencanaan anggaran untuk mendukung peningkatan mutu jenjang Dikdas dan Dikmen;
  - menggalang mitra pembangunan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen;
  - mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka;
2. Fasilitasi peningkatan mutu kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan dan komunitas belajar baik *luring* maupun *daring*;
3. Pemberdayaan komunitas belajar jenjang Dikdas dan Dikmen dalam optimalisasi perencanaan berbasis data;
4. Supervisi mutu dan pendampingan kepada dinas, kornel dan satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen terkait dengan pemanfaatan *platform* sumber daya sekolah.

Untuk menjaga agar target IKK 1.2 tetap tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan permasalahan yang muncul, BBPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan **rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun depan**. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagian besar sama seperti tahun sebelumnya, hanya ada sedikit penambahan atau penyempurnaan, berikut rencana yang akan dilakukan tersebut:

1. Advokasi kepada legislatif dan eksekutif di daerah untuk keberlanjutan implementasi kebijakan merdeka belajar;
2. Pendampingan pemanfaatan anggaran kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen agar penggunaannya lebih tepat sasaran untuk mendukung peningkatan rapor pendidikan;
3. Advokasi kepada dinas pendidikan untuk pemenuhan rasio jumlah pengawas dan pemenuhan sarana prasarana untuk peningkatan literasi;
4. *Coaching clinic* dan pendampingan kepada satuan pendidikan dan komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan pemanfaatan *platform* sumber daya sekolah;
5. Pendampingan dan fasilitasi kepada satuan pendidikan dan kornel jenjang Dikdas dan Dikmen terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi;
6. advokasi kepada dinas pendidikan dalam rangka peningkatan kerjasama dengan mitra pembangunan di daerah.



Seorang guru dikelilingan peserta didiknya sedang memberikan pembelajaran di luar ruangan sebagai bagian dari implementasi P5 di SDN Pakintelan-Kota Semarang

## CAPAIAN 40 OBJEKTIF Tahun 2023

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama yaitu meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan juga untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen membuat terobosan dengan menetapkan 40 objektif. Keempat puluh objektif tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh seluruh kepala BBPMP dan BPMP di Indonesia.

Berikut tingkat ketercapaian 40 objektif di BBPMP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023.

## TINGKAT CAPAIAN OBJEKTIF DI BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun 2023

Objektif	Uraian Objektif	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) PSP 1	80%	83%	103%
2	Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) PSP 2	60%	82%	136%
3	Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) PSP 3	40%	85%	212%
4	Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM	80% (PSP 1)	100%	125%
5	Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM	50% (PSP 2)	100%	200%
6	Pemda siap melanjutkan implementasi PSP (regulasi dan anggaran)	36	36	100%
7	Peningkatan pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana IKM	90%	83.33%	93%
8	Peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar peserta didik	50%	53%	106%
9	Peningkatan hasil AN tahun 2024 untuk sekolah IKM, minimal 50% untuk seluruh satuan pendidikan IKM yang berdasarkan hasil AN 2023 ada pada level 1 dan 2 untuk capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran	50%	74%	148%
10	satuan pendidikan penerima BOS menggunakan ARKAS 4.0	100%	99,85%	99,85%
11	satuan pendidikan penerima BOP menggunakan ARKAS 4.0	50%	97.24%	194%
12	satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLAH	60%	66,51%	111%

13	Meningkatkan kepatuhan dalam perencanaan, pembelanjaan, penatausahaan, dan pelaporan: 100% Satpen penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu	100%	99,97%	99,97%
14	Meningkatkan kepatuhan dalam perencanaan, pembelanjaan, penatausahaan, dan pelaporan: 50% Satpen melakukan perencanaan pada T-1	50%	70,25%	140,50%
15	Pemanfaatan <i>Chromebook</i> dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan penerima bantuan TIK	100%	99,81%	99,81%
16	akun belajar.id aktif	100%	71,95%	72%
17	satpen memanfaatkan fasilitas <i>Google Workspace for Education</i> (GWfE)	50%	88,38%	177%
18	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakses dan mengeksplorasi Rapor Pendidikan	36	36	100%
19-20	Satuan Pendidikan Dasmen dan Satuan Pendidikan PAUD mengakses dan mengeksplorasi Rapor Pendidikan	100% (Dasmen) 50% (PAUD)	90,33% (Dasmen) NA (PAUD)	90%
21	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan PBD melalui unduh lembar PBD	80%	89,47%	112%
22	Satuan Pendidikan PAUD melaksanakan PBD melalui unduh lembar PBD	45%	86,82%	193%
23	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas Rapor Pendidikan	30%	51,71%	172,36%
24	Pemda memasukkan indikator kinerja SPM Pendidikan	36	36	100%
25	Pemda memenuhi sub-Kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan	36	35	97,27%
26	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) memiliki delta positif indeks SPM Pendidikan	36	35	97%
27	Persepsi Pemda terhadap Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal positif	90%	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur

28	Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah meningkat	80-100%	25%	31%
29	Peningkatan capaian delta AN seluruh satpen di Indonesia yang meningkat skor AN nya	30%	51,71	172%
30	Meningkatkan persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar sebesar			Pengukuran capaian dilaksanakan pusat dan hasilnya belum rilis
31	Meningkatkan delta rata-rata partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023.	2%		Pengukuran capaian dilaksanakan pusat dan hasilnya belum rilis
32	Kabupaten/kota melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD	35	35	100%
33	satuan PAUD mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru	10%	66,45%	665%
34	SD mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru	10%	77,37%	774%
35-36	SD level 1-2 meningkat capaian literasinya (A1) di tahun 2023	20%	82,53%	413%
37	Pemerintah daerah memiliki regulasi tentang kebijakan implementasi Sekolah Sehat	36	36	100%
38	Satuan Pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning di tahun 2024	100%	77,08%	77,08%
39	Satuan pendidikan sekolah binaan mengimplementasikan program Gerakan Sekolah Sehat	100%	100%	100%
40	Peningkatan skor sebesar 0,2 untuk 30% satuan pendidikan umum dan kejuruan yang memiliki iklim inklusifitas merintis	30%	29,6%	99%

PEMENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



13/12/2023. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah (perempuan) foto bersama Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen dalam acara pemberian penghargaan sebagai pengelola BMN terbaik di lingkungan Ditjen. PAUD Dikdas dan Dikmen



## Sasaran Kegiatan 02

### Meningkatnya Tata Kelola BBPMP Provinsi Jawa Tengah

Tata kelola dan pelayanan di BBPMP Provinsi Jawa Tengah secara terus menerus mengalami peningkatan perbaikan. Perbaikan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan-penghargaan baik dari Internal Kemendikbudristek maupun dari instansi di luar Kemendikbudristek. BBPMP Provinsi Jawa Tengah dinobatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja berpredikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2017, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020 dan Satker Penyelenggara "Pelayanan Prima" Bintang 5 (2021)**. Tahun 2022, BBPMP Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) terbaik pertama di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.



Piagam Penghargaan sebagai unit kerja Penyelenggara pelayanan publik terbaik penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan dari KemenPAN dan RB yang diperoleh BBPMP Provinsi Jawa Tengah

**Pada tahun 2023**, penghargaan lain yang diperoleh antara lain 1) penghargaan sebagai unit kerja **Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan dari KemenPAN dan RB**; 2) Pengelola Barang Milik Negara (BMN) terbaik pertama di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 3) penghargaan Pengelolaan BMN terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek; 4) dampak pemangku kepentingan terbaik, 5) implementasi tugas pokok dan fungsi UPT terbaik; 6) pencapaian tujuan UPT terbaik; dan 7) peningkatan kapasitas SDM UPT terbaik.

Perbaikan tatakelola juga terlihat dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang semakin meningkat kualitasnya. Pada tahun 2023, predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori/predikat **“AA”** meningkat dari tahun 2022 yang berada pada predikat **“A”**. Predikat AA mempunyai interpretasi **“Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform).** Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu”.

Capaian sasaran kegiatan tersebut di atas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa tengah, dan IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Berikut tingkat capaian IKK 2.1 dan IKK 2.2 beserta analisis ketercapaiannya.

# Indikator Kinerja 2.1

## Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2020	A	A	100%
2021	A	A	100%
2022	A	A	100%
2023	A	AA	>100%
Akhir Periode Renstra (2024)	A	AA	>100%

Indikator kinerja 2.1 Predikat SAKIP ini menggambarkan tingkat implementasi SAKIP di BBPMP Jawa Tengah. Penilaian SAKIP dilakukan setiap tahun oleh Tim Penilai Internal yaitu inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. SAKIP merupakan sistem yang wajib diimplementasikan setiap instansi pemerintah mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Tujuan implementasi SAKIP adalah mendorong setiap instansi pemerintah untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Cara perhitungan IKK 2.1 adalah predikat yang diperoleh langsung dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kemendikbudristek, yaitu Itjen Kemendikbudristek. Predikat SAKIP diperoleh dari penilaian atas 4 komponen, mulai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah kualitatif (Predikat). Tipe perhitungan menggunakan non kumulatif yang diukur secara tahunan.

Setiap instansi pemerintah wajib menerapkan SAKIP tanpa terkecuali. penerapan tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dengan penerapan tersebut unit kerja pemerintah diharapkan menghasilkan hasil kinerja yang maksimal sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Di lingkungan Kemendikbudristek, evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi unit pelaksana teknis diawali dengan proses evaluasi *mandiri (self evaluation)* oleh unit kerja yang bersangkutan. Dalam proses pelaksanaan evaluasi mandiri tersebut, unit kerja didampingi oleh Biro Perencanaan selaku pembina penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Proses evaluasi selanjutnya sebagai nilai akhir dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

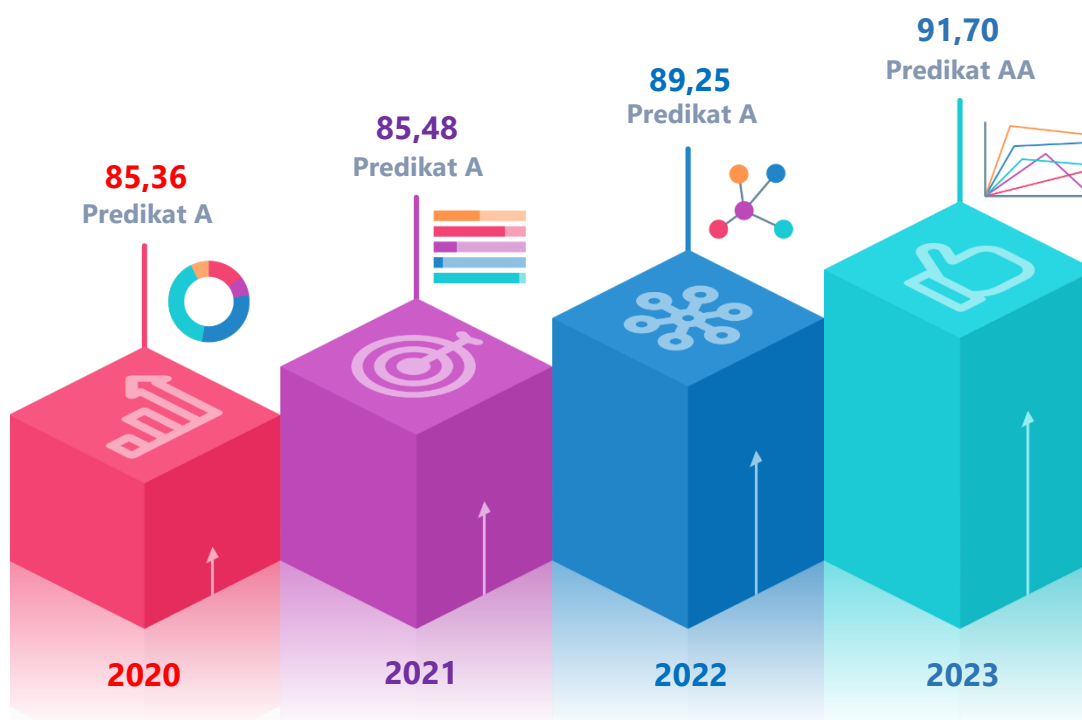
Dibandingkan dengan target tahunan, capaian realisasi IKK 2.1 telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi IKK 2.1 Predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 adalah AA. Sesuai PK tahun 2023, BBPMP Provinsi Jawa Tengah menargetkan predikat A, dengan nilai sebesar 91,70. Predikat SAKIP diperoleh sesuai evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2023. Predikat "AA" mengandung interpretasi "Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu".

Berikut rincian nilai implementasi SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

**Tabel Nilai Akuntabilitas Kinerja**  
Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27,6
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23
<b>Total Nilai</b>		<b>100%</b>	<b>91,70</b>

## NILAI AKUNTABILITAS KINERJA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH 2020-2023



Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian realisasi IKK 2.1 pada tahun 2023 lebih tinggi dari atau meningkat dari tahun sebelumnya. Secara angka kuantitatif, capaian realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,45 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu dari nilai 89,25 di tahun 2022 meningkat menjadi 91,70 di tahun 2023. Jika dilihat dari predikat, predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah adalah A dan pada tahun 2023 predikat meningkat menjadi AA.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, persentase capaian IKK 2.1 sudah melebihi target, yaitu dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra adalah Predikat A, pada tahun 2023 sudah berhasil terealisasi sebesar AA (lihat tabel di atas). Dari data tersebut dapat disimpulkan target capaian untuk periode akhir Renstra telah tercapai, bahkan telah melebihi target.

Dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP Kemendikbudristek, nilai SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi. Tahun 2023 nilai SAKIP Kemendikbudristek sebesar 79,56 (BB) sedangkan nilai SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 91,70 (AA). Nilai SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi 12,14.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKK 2.1 diantaranya:

- 1) komitmen tinggi dari pimpinan dan pegawai dalam menerapkan SAKIP secara akuntabel;
- 2) pemenuhan dokumen-dokumen SAKIP secara berkualitas, lengkap dan tepat waktu;
- 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik setiap bulanan, triwulanan dengan melibatkan pimpinan dan penanggungjawab kegiatan;
- 4) pemanfaatan dokumen Renstra dan Laporan Kinerja untuk menyusun rencana kerja dan evaluasi kinerja organisasi,
- 5) peningkatan SDM terkait akuntabilitas kepada pegawai yang terlibat dalam penerapan SAKIP di BBPMP Provinsi Jawa Tengah, dan
- 6) pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan SAKIP.

### **Kegiatan Pendukung**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di BBPMP Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Pelaksanaan bedah POK di setiap awal tahun;
2. Penyusunan RKT, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dengan tepat waktu;
3. Reviu Renstra secara periodik dengan melibatkan unit kerja Pembina;
4. Melakukan analisis pengukuran kinerja secara periodik mulai dari TW I, II, III dan IV;
5. Melakukan pelaporan capaian output melalui aplikasi *SPASIKITA* dan aplikasi SAKTI setiap awal bulan;
6. Evaluasi kinerja secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan)
7. Sosialisasi IKK BBPMP kepada seluruh pegawai dikarenakan adanya perubahan IKK yang merupakan dampak restrukturisasi organisasi;
8. Pembinaan pegawai melalui apel setiap hari senin sekaligus penguatan kompetensi pegawai;
9. Penyampaian dan publikasi dokumen SAKIP (Renstra, Perjanjian kinerja dan laporan kinerja) tepat waktu;
10. Workshop penyusunan laporan kinerja dengan melibatkan tim penyusun LAKIN, tim reviu, tim evaluasi SAKIP internal, Kapokja dan anggotanya, serta PIC kegiatan dan tim SPI.

Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah didampingi Kapokja dan Konsultan sedang memberikan pengarahan pada kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Hotel Laras Asri, Salatiga 4-6 Desember 2023.



Kepala Bagian Umum (memakai kaos Merdeka belajar) sedang membahas capaian kinerja IKK dan output kegiatan bersama anggota POKJA dan Konsultan dalam kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Hotel Laras Asri, Salatiga 4-6 Desember 2023.

Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah (membawa mix) sedang memberikan masukan dan komentar atas paparan hasil kinerja yang disampaikan oleh kelompok 4 dalam kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Hotel Laras Asri, Salatiga 4-6 Desember 2023.



Meskipun secara target capaian telah tercapai di tahun 2023, namun masih ditemui **hambatan/kendala dan permasalahan** dalam peningkatan kualitas penerapan SAKIP di BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Berikut catatan

permasalahan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sesuai hasil evaluasinya untuk BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

1. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kinerja yang akan dicapai dan telah selaras antara PK, Renstra, dan Renja, namun terdapat permasalahan pada IKK 1.2 yang capaian kinerjanya jauh melampaui target sampai 356%. Hal tersebut disebabkan pengukuran kinerja menggunakan hasil akreditasi bukan dari rapor pendidikan (sesuai definisi operasional). Rapor Pendidikan menjadi menjadi kewenangan BSKAP yang baru dikeluarkan pada Maret 2023;
2. BBPMP Provinsi Jawa Tengah telah memiliki pedoman pemilihan pegawai berprestasi dan pemberian sanksi pegawai. Pemberian reward dan *punishment* telah dilakukan (bulanan), namun proses pemilihan pegawai berprestasi dan pemberian sanksi pegawai sesuai pedoman (melalui rekap penilaian akhir) masih belum terlihat;
3. Keterlibatan Kepala Satuan kerja dan seluruh pegawai dalam penyusunan laporan kinerja masih belum terlihat dalam dokumen pendukung serta informasi terkait proses penyusunan lapkin dari awal sampai dengan finalisasi belum terjelaskan dalam kolom penjelasan;
4. Dari 25 pegawai yang telah diberikan SK sebagai Tim SAKIP, 6 orang telah mengikuti diklat terkait AKIP;
5. Perlu diberikan penjelasan peningkatan implementasi AKIP di satker secara riil seperti apa (poin-poin apa saja yang meningkat dalam 4 komponen penilaian), tidak hanya sebatas peningkatan nilai saja.

Selain catatan tersebut, Inspektorat Jenderal juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas SAKIP di BBPMP Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Agar melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen untuk mendapatkan solusi pada permasalahan IKK 1.2. apakah merumuskan kembali definisi operasional dengan menggunakan hasil akreditasi atau tetap menggunakan rapor pendidikan (dengan catatan rapor pendidikan harus sudah dikeluarkan oleh BSKAP pada Desember) mengingat Renstra masih sampai dengan tahun 2024;
2. Agar dokumen pendukung terkait proses pemilihan pegawai berprestasi dan sanksi pegawai antara lain dokumen rekap penilaian akhir (sesuai format dalam pedoman) dapat dilampirkan, sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian *reward* dan *punishment* telah sesuai prosedur;
3. Agar dalam penyusunan laporan/notula kegiatan dapat merekam seluruh aktifitas kegiatan sehingga keterlibatan/partisipasi seluruh pihak baik itu kepala satker maupun seluruh pegawai dapat terlihat serta perlu diberikan

- penjelasan proses penyusunan lapkin dari awal sampai dengan finalisasi dalam kolom penjelasan atau dokumen pendukung;
4. Agar dapat disampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pengelola SAKIP seperti workshop pengimbasan dari pegawai yang telah mengikuti diklat SAKIP, dll, mengingat keterbatasan pegawai yang dapat diikutsertakan dalam diklat Sakip (1 orang/tahun);
  5. Agar memberikan penjelasan terkait peningkatan implementasi AKIP di satker secara konkret seperti apa (poin-poin apa saja yang meningkat dalam 4 komponen penilaian), tidak hanya sebatas peningkatan nilai saja.

Beberapa **langkah antisipasi yang telah dilakukan** untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain:

1. BBPMP telah secara terus menerus berkoordinasi dengan Setditjen PAUD Dikdas dan Dikmen dalam implementasi SAKIP terutama pada capaian IKK;
2. Dalam proses pemberian *rewards* kepada pegawai, koordinator kepegawaian telah melakukan proses penetapan dengan mengacu pada POS yang ditetapkan;
3. BBPMP Provinsi Jawa Tengah setiap tahun melakukan peningkatan kompetensi di bidang akuntabilitas kinerja kepada semua pegawai melalui kegiatan senin pagi belajar, workshop penyusunan LAKIN, dan menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat.



Tim kerja akuntabilitas sedang mendiskusikan terkait pemenuhan dokumen dalam rangka evaluasi ZI WBBM tahun 2023

Berikut beberapa **rencana tindak lanjut yang akan dilakukan** untuk mengatasi permasalahan yang muncul, sehingga akuntabilitas kinerja dapat meningkat kualitasnya:

1. Meningkatkan kualitas laporan kegiatan workshop penyusunan LAKIN, agar laporan menggambarkan keterlibatan pimpinan dan semua pegawai;
2. Melengkapi dokumen-dokumen terkait pemberian *rewards* dan *punishment* pegawai;
3. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang akuntabilitas kinerja melalui kegiatan *capacity building* secara internal, mengundang narasumber dari Itjen dan Biro Perencanaan, dan menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat SAKIP di Pusdiklat, serta melakukan studi banding ke unit kerja lain.

## Indikator Kinerja 2.2

### Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2020	81	97	120%
2021	82	98	120%
2022	83	98,08	118%
2023	84	97,09	116%
Akhir Periode Renstra (2024)	85	97,09	114%

Definisi operasional IKK 2.2, Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya,

untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian kinerja anggaran dilakukan atas 2 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA).

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, nilai IKPA berkontribusi 50% sedangkan nilai EKA 50%. Bobot masing-masing variabel pada aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Adapun cara perhitungan IKK 2.2 adalah  $[50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$ . Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART DJA, sedangkan Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OM-SPAN). Satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah Kualitatif (Kategori). Tipe perhitungan menggunakan non kumulatif yang diukur secara bulanan.

Kementerian Keuangan melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada semua instansi pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan penilaian dari aplikasi SPASIKITA milik Kemendikbudristek yang tersinkronisasi dengan aplikasi di aplikasi SMART dan OM-SPAN milik Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 sebesar 97,09.

Berdasarkan data kinerja pada tabel di atas, capaian realisasi IKK 2.2 “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BBPMP Provinsi Jawa Tengah” untuk tahun 2023 telah tercapai dengan sangat baik atau melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi IKK 2.2 adalah sebesar 97,09 (kategori sangat baik) dari target yang ditetapkan sebesar 84 (Kategori Baik), dengan persentase capaian sebesar 116%. Capaian realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 97,65 diperoleh dari akumulasi nilai EKA (50%) sebesar 99,87 dan nilai IKPA (50%) sebesar 94,31.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami koreksi sebesar 0,99 poin, dari sebelumnya 98,08 di tahun 2022 menjadi 97,09

di tahun 2023. Koreksi nilai terjadi pada indikator IKPA yaitu dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 95,44 turun menjadi 94,31. Meskipun terjadi koreksi dari tahun sebelumnya, namun capaian tahun 2023 masih melebihi target tahun berjalan yang ditetapkan. Selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 nilai kinerja anggaran BBPMP Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan terus menerus. Nilai kinerja anggaran tersebut adalah sebesar 97 pada tahun 2020, sebesar 98 pada tahun 2021, dan sebesar 98,08 pada tahun 2022.

**Tabel Penilaian Kinerja Anggaran**

Tahun 2022-2023

No	Komponen Nilai	Capaian 2022	Capaian 2023	Kategori
1	EKA (60%)	99.85	99.87	Sangat Baik
2	IKPA (40%)	95,44	94.31	Sangat Baik
3	Total NKA	98,08	97.09	Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, persentase capaian IKK 2.2 sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra sebesar 85, pada tahun 2023 sudah berhasil terealisasi sebesar 97,09 dengan persentase capaian sebesar 114% (lihat tabel di atas). Dari data tersebut dapat disimpulkan target capaian untuk periode akhir Renstra telah tercapai, bahkan telah melebihi target.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKK 2.2 diantaranya: 1) pemantauan kinerja yang dilakukan secara periodik oleh pimpinan; 2) komitmen dari kepala kelompok kerja dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan untuk mencapai target output yang ditetapkan; dan 3) kompetensi pengelola keuangan, BMN dan pengadaan barang dan jasa yang tinggi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan anggaran.

## Kegiatan Pendukung

Berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBPMP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023:

- 1) Workshop Penyusunan Laporan;
- 2) Melakukan revisi halaman III DIPA;
- 3) Rapat pembahasan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- 4) Melakukan revisi POK;
- 5) Melakukan pemutakhiran data halaman 3 DIPA;
- 6) Melakukan pelaporan capaian IKK pada Aplikasi SPASIKITA.



*Januari 2023, Kepala BBPMP didampingi kepala Bagian Umum memimpin pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja tahunan dan bedah POK di tahun 2023, kegiatan bertempat di ruang rapat B24, dihadiri dari unsur koordinator, penanggungjawab kegiatan, PMO, dan SPI*

**Permasalahan dan hambatan** yang dijumpai BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencapaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L adalah perubahan pengelolaan kegiatan di Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen dan UPT, sehingga mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan.

Beberapa langkah antisipasi yang **telah dilakukan** BBPMP Provinsi Jawa Tengah agar target indikator kinerja IKK 2.2 dapat tercapai antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan bedah POK setiap awal tahun;
2. Penunjukkan koordinator kegiatan;
3. Melakukan penyusunan jadwal kegiatan di awal tahun;
4. Melakukan monitoring keterlaksanaan kegiatan secara berkala;

5. Mengembangkan berbagai inovasi dalam mendukung perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan seperti aplikasi LENTERA dan LAMPU SENTIR.

Beberapa **tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan** agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan kegiatan secara berkala
2. Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan di semua kelompok kerja

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh instansi pemerintah. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai implementasi anggaran yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bobot 50%. Penilaian pada aspek implementasi dilakukan dengan melihat empat indikator yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan indikator kinerja penilaian IKPA ada 13 indikator yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, capaian output, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Return SP2D, Pagu Minus, dan Dispensasi.

# REALISASI ANGGARAN

## 1. Capaian Anggaran

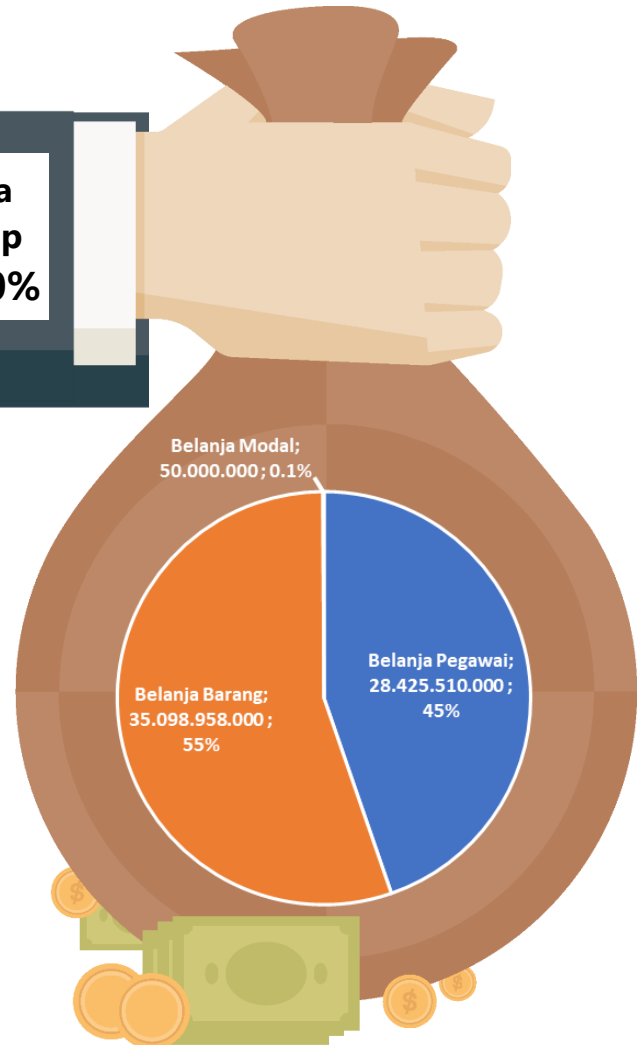


Sumber data <https://mol.kemdikbud.go.id/>

BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mengelola total pagu anggaran sebesar Rp63.574.468.000-. Dari pagu tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp63.129.922.448- dengan persentase daya serap anggaran sebesar 99,30%.

Dari total anggaran yang ada di BBPMP Provinsi Jawa Tengah, sebanyak Rp35.098.958.000.- atau 55% digunakan untuk belanja barang untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian-pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sebanyak Rp28.425.510.000- atau 45% digunakan untuk belanja pegawai diantaranya pembayaran gaji dan tunjangan. Porsi pagu terkecil ada di belanja modal yaitu hanya sebanyak Rp50.000.000- atau 0,1%. (lihat grafik di atas)

Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran/indikator kinerja dan anggaran untuk dukungan manajemen.





## 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, BBPMP Provinsi Jawa Tengah mendapat anggaran sebesar Rp63.574.468.000-. dan telah terealisasi sebesar Rp63.129.922.448- atau sebesar 99,30%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja melebihi target (>100%) dengan perbandingan tersebut antara penggunaan anggaran dengan kinerja yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran** di BBPMP **sangat efektif dalam mendukung pencapaian kinerja**.

Berdasarkan periode pelaporan SMART tahun 2023 melalui aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>, BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 20% dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Besaran efisiensi pada program fasilitasi dan pembinaan lembaga sebesar Rp5.132.905.373- dari total anggaran sebanyak Rp25.390.862.000,-. Hasil perhitungan efisiensi tersebut diperoleh setelah target dari empat indikator kinerja kegiatan dalam PK tahun 2023 dan target output yang ditetapkan telah tercapai. Pada tahun 2023 output yang ditargetkan oleh BBPMP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 51.261 satuan

pendidikan yang difasilitasi penjaminan mutunya, dari target tersebut berhasil terealisasi 63.032 satuan pendidikan dengan persentase capaian 123%. Capaian target output tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Secara rinci hasil efisiensi anggaran diperoleh dari:

1. Pada Rincian *Ouput* (RO) Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya terdapat efisiensi sebesar Rp4.454.258.510 yang digunakan untuk menambah jumlah sasaran sebanyak 6.333 lembaga.
2. Pada Rincian *Ouput* (RO) Satuan Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya terdapat efisiensi sebesar Rp678.646.862 yang digunakan untuk menambah jumlah sasaran sebanyak 5.438 lembaga.

Anggaran hasil efisiensi digunakan kembali/dioptimalisasikan untuk memperbanyak volume *output* dari kegiatan lain. Selain itu, hasil efisiensi tersebut juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target dari IKK 1.1 "Persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya" dan IKK 1.2 "Persentase prov, kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Kegiatan yang dibiayai dari hasil efisiensi anggaran diantaranya:

1. Kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan dinas pendidikan, anggota DPRD, dan Badan Perencanaan Daerah;
2. Pelaksanaan rencana tindak lanjut rapat koordinasi di 35 kabupaten/kota;
3. Bimbingan teknis pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi;
4. Orientasi teknis peningkatan Literasi dan Numerasi (Litnum);
5. Pendampingan komunitas belajar dalam penguatan Litnum SD.

Selain efisiensi anggaran, BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga berhasil melakukan efisiensi dari segi **efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)**. Dalam pelaksanaan kegiatan advokasi dan pendampingan ke pemerintah daerah maupun satuan pendidikan, jika semestinya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan setidaknya dua orang atau lebih, di BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam mengefisensikannya dengan hanya menugaskan satu atau dua pegawai tanpa mengurangi kualitas *output* hasil yang diperoleh.

Efisiensi sumber daya lain yang berhasil dilakukan adalah **efisiensi waktu** pelaksanaan kegiatan. Jika pelaksanaan advokasi, supervisi, fasilitasi dan pendampingan peningkatan mutu pendidikan ke pemerintah daerah dan satuan pendidikan sejatinya dibutuhkan waktu dua sampai tiga hari, maka

waktu pelaksanaan tersebut berhasil di efisiensi menjadi satu atau dua hari tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas *output* yang dihasilkan.

Sepanjang tahun 2023 terjadi 11 kali revisi dari pagu awal sebesar Rp 79.319.920.000,- sampai berubah menjadi Rp63.574.468.000,- sebagaimana dalam tabel di bawah.

**Tabel Perubahan Anggaran Tahun 2023**

Sejarah Revisi	Pagu Anggaran (Rp)	Kewenangan	Keterangan
Revisi 1 tanggal 29 Desember 2022	79.319.920.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Blokir AA untuk belanja barang sebesar Rp. 5.024.875.000
Revisi 2 tanggal 10 Maret 2023	79.319.920.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Blokir AA untuk belanja barang sebesar Rp. 15.233.446.000
Revisi 3 tanggal 14 April 2023	79.319.920.000	DJPB	Revisi oleh Satker terkait Penarikan Hal III Dipa Triwulan II
Revisi 4 tanggal 11 Juli 2023	79.319.920.000	DJPB	Revisi oleh Satker terkait Penarikan Hal III Dipa Triwulan III
Revisi 5 tanggal 18 Juli 2023	78.445.180.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 874.740.000
Revisi 6 tanggal 11 Agustus 2023	75.080.520.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Realokasi Belanja Operasional sebesar Rp. 3.364.660.000
Revisi 7 tanggal 18 Agustus 2023	75.080.520.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Buka Blokir AA sebesar Rp. 5.866.890.000
Revisi 8 tanggal 26 September 2023	72.273.817.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.806.703.000
Revisi 9 tanggal 10 Oktober 2023	63.574.468.000	DJA	Revisi oleh unit utama terkait Realokasi Blokir AA sebesar Rp. 8.699.349.000
Revisi 10 tanggal 13 Oktober 2023	63.574.468.000	DJPB	Revisi oleh Satker terkait Penarikan Hal III Dipa Trwulan IV
Revisi 11 tanggal 19 Desember 2023	63.574.468.000	KPA	Pemutakhiran Data POK pada kewenangan KPA

# Inovasi, Penghargaan, & Program *Crosscutting/Collaborative*

## 1. Inovasi

Dalam rangka mendukung pencapaian target dari empat indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, BBPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa inovasi berikut:

### #1 LAMPU SENTIR

Layanan Masyarakat Terpadu Secara Terintegrasi (LAMPU SENTIR) adalah inovasi pelayanan yang berbasis online (*web* dan *android*) yang sebelumnya bernama SIMPADU DIKBUD. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan secara cepat, murah, waktu pelayanan tidak terbatas, dan mudah diakses. Inovasi ini dibuat untuk mengatasi permasalahan antara lain banyaknya permohonan informasi diluar tugas dan fungsi BBPMP seperti akreditasi, penilaian angka kredit, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sertifikasi.



Aplikasi LAMPU SENTIR dapat diakses di laman [ult.bbpmprateng..id](http://ult.bbpmprateng..id)

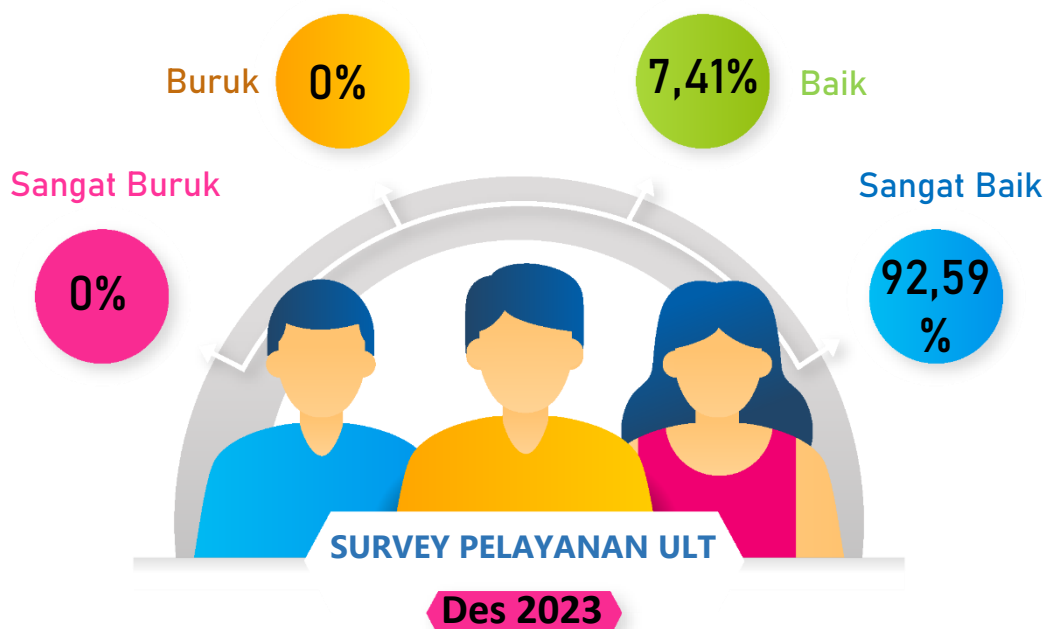


Inovasi ini mengkolaborasi dan mengintegrasikan pelayanan instansi pemerintah lain seperti dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/Kota, cabang dinas, BAN S/M, dan UPT Kemendikbudristek yang berada di Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta memberikan layanan ke masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa layanan yang diakomodir antara lain penjaminan mutu pendidikan, penilaian angka kredit, rapor pendidikan, pendidikan profesi guru, akreditasi, sertifikasi dan layanan lain seperti cagar budaya, pengawas, kepala sekolah, PAUD Dikmas. Sejak peluncurannya aplikasi ini telah berhasil melayani pengguna layanan sebanyak 151.270 orang (periode Mei 2019 s.d 31 Desember 2023).



Kepuasan layanan unit layanan terpadu sangat tinggi. Dari hasil survei layanan yang dilakukan secara periodik setiap bulan, berdasar survei bulan Desember 2023 tingkat kepuasannya mencapai rata-rata 92,59% (sangat baik), dan 7,41% (Baik).



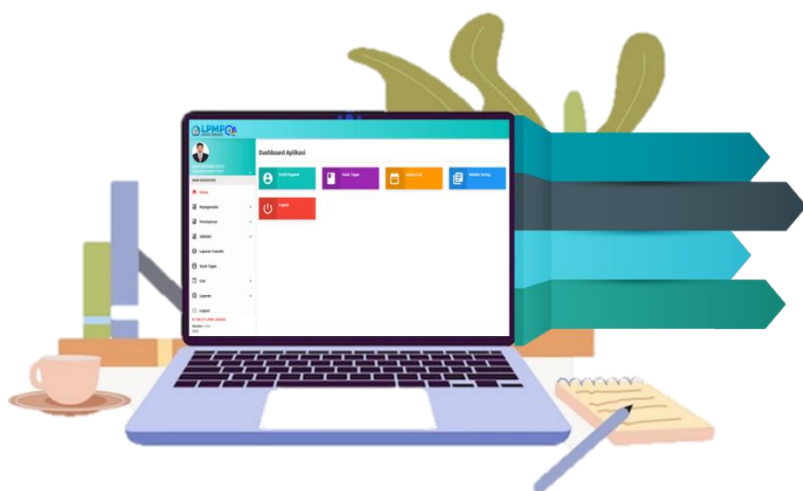
Dampak positif yang dihasilkan dari aplikasi ini antara lain pengguna dengan mudah mengakses, alur pelayanan singkat, jumlah permasalahan terpecahnya semakin banyak, efisiensi biaya, waktu pelayanan yang tidak terbatas, dan

kolaborasi pelayanan dalam satu tautan. Aplikasi ini juga telah direplikasi oleh instansi pemerintah lain seperti BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Inovasi Lampu Sentir ini dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan pada IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dan IKK 1.2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).

## #2 LENTERA (Layanan Elektronik Terpadu)

Merupakan inovasi aplikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pihak internal BBPMP Provinsi Jawa Tengah sehingga tercipta tata kelola kelembagaan yang cepat, transparan dan akuntabel. Aplikasi ini berbasis website yang dapat diakses melalui *sim.lmpjatang.go.id*. Beberapa pelayanan yang disediakan dalam aplikasi ini antara lain sistem informasi manajemen surat tugas, pengajuan cuti, data kepegawaian, inventaris BMN, pengelolaan keuangan, arsip kepegawaian dan pengelolaan kegiatan.



### Fitur-Fitur:

1. Pembuatan Surat Tugas dan Unggah bukti dinas luar
2. Pengelolaan kegiatan dan keuangan
3. Pengajuan cuti, surat ijin, dan surat keterangan lainnya
4. Peminjaman BMN
5. Profile dan dokumen arsip pegawai
6. Monitoring keberadaan pegawai
7. Informasi transfer
8. Pemantauan realisasi target kegiatan

Inovasi LENTERA ini telah direplikasi beberapa BPMP lain seperti BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama DANGSANAK, dan BPMP Provinsi D.I Yogyakarta dengan nama Aplikasi Surat Tugas.

Dampak yang dirasakan pengguna aplikasi ini antara lain: 1) adanya kemudahan dan kecepatan dalam penyelesaian administrasi yang dibutuhkan pegawai, 2) transparansi pengelolaan kantor yang meningkat; 3) kemudahan dalam pengelolaan kegiatan; dan 4) efisiensi anggaran.

Inovasi LENTERA ini dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran kegiatan kedua yaitu meningkatnya tata Kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

### **#3 WALI BERAKHLAK**

Salah satu tugas BBPMP adalah melakukan supervisi, pendampingan dan advokasi baik kepada pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. BBPMP Provinsi Jawa Tengah mempunyai wilayah kerja di 35 kab/kota. Permasalahan yang melatarbelakangi dibuatnya wali pada masing-masing kab/kota yaitu adanya kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antara BBPMP Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan target kinerja di setiap kab/kota belum ada yang mengampu atau bertanggungjawab dalam pencapaiannya. Seiring dengan itu, tugas dan fungsi Widyaprada juga melakukan pendampingan dan advokasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Dengan adanya wali berakhlak ini diharapkan akan memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dengan BBPMP.

Setiap Kabupaten/Kota akan diampu oleh satu tim wali wilayah. Anggota tim wali wilayah terdiri dari 1 atau 2 orang Widyaprada dengan didampingi 2 atau 3 jabatan pelaksana. Dampak yang dirasakan dengan adanya program wali wilayah diantaranya 1) pemerataan kesempatan peningkatan kompetensi pegawai; 2) kemudahan dalam koordinasi terkait penjaminan dan peningkatan mutu; 3) pelaksanaan pendampingan dan advokasi ke pemerintah daerah dan satuan pendidikan lebih efektif; 4) target kinerja pada masing-masing kab./kota jelas pengampunya; dan 5) mengurangi konflik dan kecemburuan antar pegawai; 6) menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan capaian objektif antar wilayah secara lebih optimal.

Pimpinan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja masing-masing wali wilayah setiap minggu dan setiap tahun pimpinan melakukan perubahan anggota pada masing-masing wali wilayah sesuai hasil evaluasi yang ada.

Inovasi wali berakhlak ini dikembangkan dalam upaya mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan pada IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dan IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas

dan Dikmen). Selain target tersebut, inovasi ini juga dikembangkan untuk mendukung pencapaian dari target 40 objektif yang ditetapkan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.

#### #4 APEL SEGAR (APEL SEnin paGi belajaR)

BBPMP Provinsi Jawa Tengah salah satu tugasnya adalah melakukan pendampingan penjaminan mutu pendidikan baik kepada dinas pendidikan maupun kepada satuan pendidikan. Untuk dapat melakukan pendampingan dengan baik, perlu didukung kompetensi yang cukup dari pegawai yang ada. Karena permasalahan itulah BBPMP Provinsi Jawa Tengah membuat kegiatan pagi belajar pada setiap hari senin bersamaan dengan apel setiap senin, kegiatan tersebut dikenal dengan nama APEL SEGAR (APEL Senin paGi belajaR).

Pelaksanaan Apel Segar dilaksanakan setiap hari senin, dan wajib diikuti oleh semua pegawai. Setiap pegawai duduk di meja sesuai dengan anggota wali wilayahnya. Pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan Apel Segar adalah anggota wali wilayah secara bergantian setiap minggunya. Materi disampaikan antara lain kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan, pemaparan progress capaian kinerja oleh Widyaprada di wali wilayah yang bertugas, pemaparan terkait dengan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh ketua tim kerja atau PIC kegiatan.

08/01/2024,  
Kepala BBPMP  
Provinsi Jawa  
Tengah sedang  
memberikan  
penjelasan  
terkait  
mekanisme kerja  
dalam kegiatan  
Apel Segar yang  
dilakukan setiap  
senin pagi



Selain penyampaian-penyampaian tersebut, pelaksanaan Apel Segar juga disampaikan materi lain seperti internalisasi berAKHLAK, informasi terkait Renstra, perjanjian kinerja, dan capaian kinerja yang dihasilkan, serta materi-

materi lain terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai dengan narasumber dari instansi lain atau dari praktisi/professional.

Pelaksanaan Apel Segar telah dilaksanakan selama lebih dari 1 tahun, beberapa dampak yang dihasilkan antara lain tercapainya target-target dalam 40 objektif, peningkatan kompetensi pegawai, hubungan antar pegawai lebih dekat, menurunnya resistensi dari pegawai, budaya berAKHLAK semakin terinternalisasi.



09/12/2023, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah menerima piagam penghargaan dengan kategori Peningkatan Kapasitas SDM UPT Terbaik

Inovasi Apel segar diakui sangat efektif dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai, Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen kepada BBPMP Provinsi Jawa Tengah sebagai Satker dengan **Peningkatan kapasitas SDM UPT terbaik.**

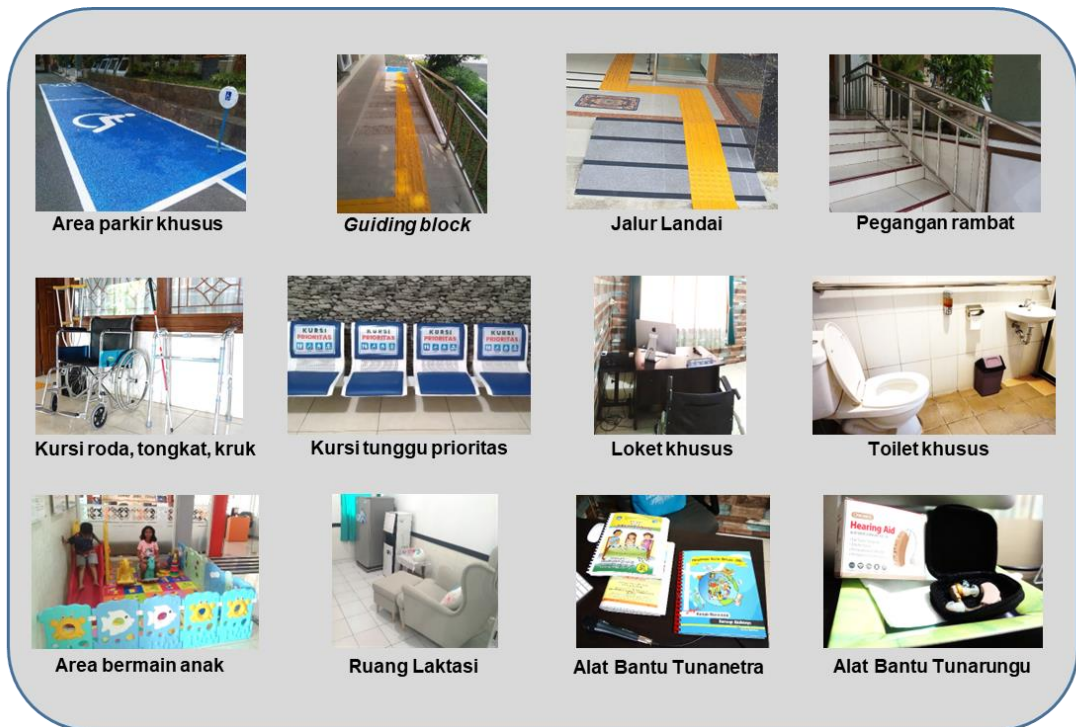
Inovasi Apel Segar dikembangkan dalam upaya mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan kedua yaitu meningkatnya tatakelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Selain sasaran kegiatan tersebut, inovasi ini juga dikembangkan untuk mendukung pencapaian dari target 40 objektif yang ditetapkan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.

#### **#5 LAYANAN KELOMPOK RENTAN**

BBPMP Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek bertanggungjawab dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan baik kepada pemerintah daerah, komunitas belajar dan satuan pendidikan. Untuk mendukung pemberian layanan prima kepada pelanggan dengan latar dan kondisi yang beraneka ragam, BBPMP Provinsi Jawa Tengah melengkapi sarana dan prasarana yang ada sesuai kebutuhan semua pelanggan, termasuk untuk kelompok rentan.

Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan kelompok rentan menerima pelayanan antara lain area parkir khusus, *guiding block*, jalur landai, pegangan rambat, kursi roda, tongkat, kruk, kursi tunggu prioritas, loket khusus, toilet khusus, area bermain anak, ruang laktasi, alat bantu tunarunggu dan alat bantu tunanetra.

### Sarana dan Prasarana untuk Kelompok Rentan



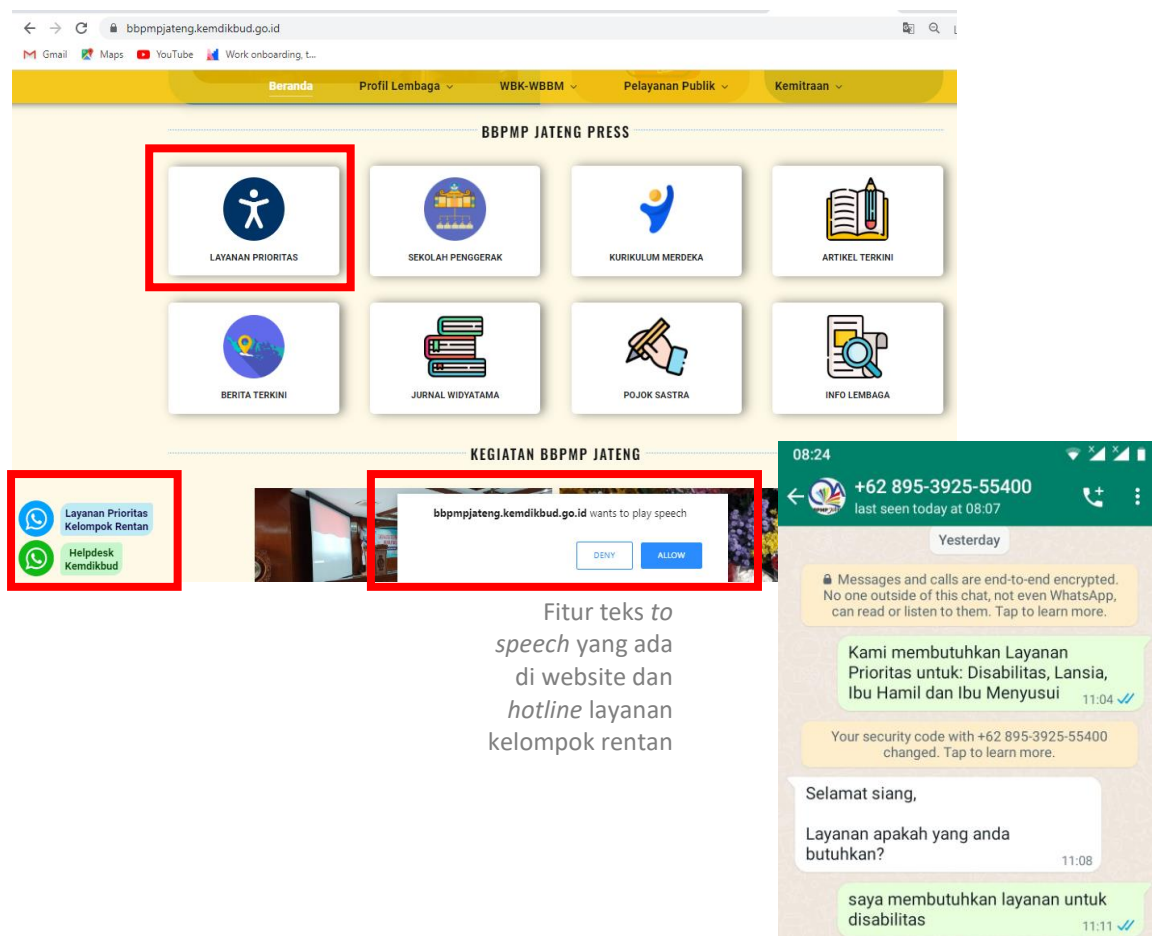
Selain pemenuhan sarana dan prasarana, BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga membuat inovasi untuk memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, yaitu:

- 1. Pelayanan Kelompok Rentan Dirumah (PAKETAN DIRUMAH).** Inovasi ini adalah pelayanan antar jemput bagi kelompok rentan bagi pelanggan yang berada di wilayah Semarang Raya (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak). Penerima layanan cukup menghubungi



nomor *hotline*, maka petugas dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah akan mengantar atau mendatangi rumah untuk memberikan layanan yang diminta.

2. Inovasi Layanan berupa media informasi berbasis teknologi informasi untuk membantu penyandang tuna netra dalam memperoleh informasi. Dalam *website* tersebut dilengkapi fitur *teks to speech* dan tersedia informasi terkait fasilitas dan layanan pada BBPMP Provinsi Jawa Tengah
3. *Hotline* layanan yang dikhususkan untuk melayani kelompok rentan di sediakan melalui *website* dan *whatsApp*



Fitur *teks to speech* yang ada di *website* dan *hotline* layanan kelompok rentan

Inovasi pelayanan untuk kelompok rentan dikembangkan dalam upaya mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan kedua yaitu meningkatnya tatakelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Selain sasaran kegiatan tersebut, inovasi ini juga dikembangkan untuk mendukung pencapaian dari target 40 objektif yang ditetapkan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.

## 2. Penghargaan

Tata kelola BBPMP Provinsi Jawa Tengah secara terus menerus mengalami perbaikan. Perbaikan pengelolaan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan-penghargaan baik dari Internal Kemendikbudristek maupun dari instansi di luar Kemendikbudristek. Penghargaan yang telah diperoleh tersebut diantaranya predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (2017)**, **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (2020)** dan **Satker Penyelenggara "Pelayanan Prima" Bintang 5 (2021)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2022 dan 2023, BBPMP Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan adalah sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) terbaik pertama di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Pada tahun 2023**, BBPMP Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan penghargaan sebagai **Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan dari KemenPANRB**. Penghargaan tersebut merupakan bukti pengakuan instansi luar atas komitmen BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan prima kepada semua penerima layanan tanpa diskriminasi. Pada tahun 2023 BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga mendapat beberapa penghargaan dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen diantaranya: 1) penghargaan Pengelolaan BMN terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek; 2) Dampak pemangku kepentingan terbaik, 3) implementasi tugas pokok dan fungsi UPT terbaik; dan 4) Peningkatan kapasitas SDM UPT terbaik.

09/12/2023,  
Kepala BBPMP  
Provinsi Jawa  
Tengah menerima  
piagam  
penghargaan  
dengan kategori  
implementasi  
tupoksi UPT  
terbaik



# Penghargaan BBPMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Peringkat 1  
Pengelolaan BMN Terbaik  
di Lingkungan Ditjen  
PAUD Dikdas dan Dikmen

Perhargaan Atas Dukungan  
dan kolaborasinya dalam  
keberjalanan Program  
Kampus Mengajar

Perhargaan Sebagai Tim  
Pendamping Percepatan ZI  
WBK/WBBM di Lingkungan  
Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen



## PENGHARGAAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Penghargaan Duta  
Merdeka Belajar

**KATEGORI:**  
Capaian Tujuan UPT



Penghargaan Duta  
Merdeka Belajar

**KATEGORI:**  
Peningkatan  
Kompetensi SDM UPT



Penghargaan Duta  
Merdeka Belajar

**KATEGORI:**  
Dampak Pemangku  
Kepentingan



Penghargaan Duta  
Merdeka Belajar

**KATEGORI:**  
Implementasi Tugas  
dan Fungsi UPT

### 3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Untuk mendukung pencapaian target Sasaran Kegiatan 1 yaitu meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, BBPMP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program *crosscutting/collaborative* yaitu bekerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah atau mitra pembangunan swasta yang bergerak di bidang pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Program *crosscutting/collaborative* yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak **12 Program *crosscutting/collaborative*** baik dengan pemerintah daerah, yayasan pendidikan, komunitas belajar, mitra pembangunan, maupun dengan satuan pendidikan. Berikut Daftar lembaga yang menjalin kerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tahun 2023.

#### Daftar Pelaksanan Program *Crosscutting/Collaborative* dengan Pemerintah daerah dan Yayasan Pendidikan

Tahun 2023

No	Instansi	Kegiatan	Tanggal
1	SMA PL Don Bosko, Kota Semarang	Diklat Implementasi Kurikulum Merdeka	10, 11, 17, 18 Maret 2023
2	SMAN Welahan, Kab. Jepara	Diklat Peningkatan Kompetensi Paedagogik Guru Dalam Penyusunan KOSP Dan Modul Ajar	13 s.d. 16 Juni 2023
3	MAN Sukoharjo, Kab. Sukhoarjo	Diklat Implementasi Kurikulum Merdeka	20 s.d. 23 Juni 2023
4	YPMNU, Kota Semarang	Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	13 s.d. 15 Juli 2023
5	SMAN 1 Mayong, Kab. Jepara	Diklat Peningkatan Literasi Dan Numerasi	12 s.d. 15 September 2023
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang	Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial	3 s.d. 6 Oktober 2023
7	Dinas Pendidikan Kab. Grobogan	Diklat Dasar Paud	13 s.d. 17 November 2023
8	SMAN 1 Nalumsari, Kab. Jepara	Diklat Penguasaan Literasi Dan Numerasi Melalui Media Canva Dalam Upaya Peningkatan Rapor Pendidikan	6,7,13, 14 Desember 2023

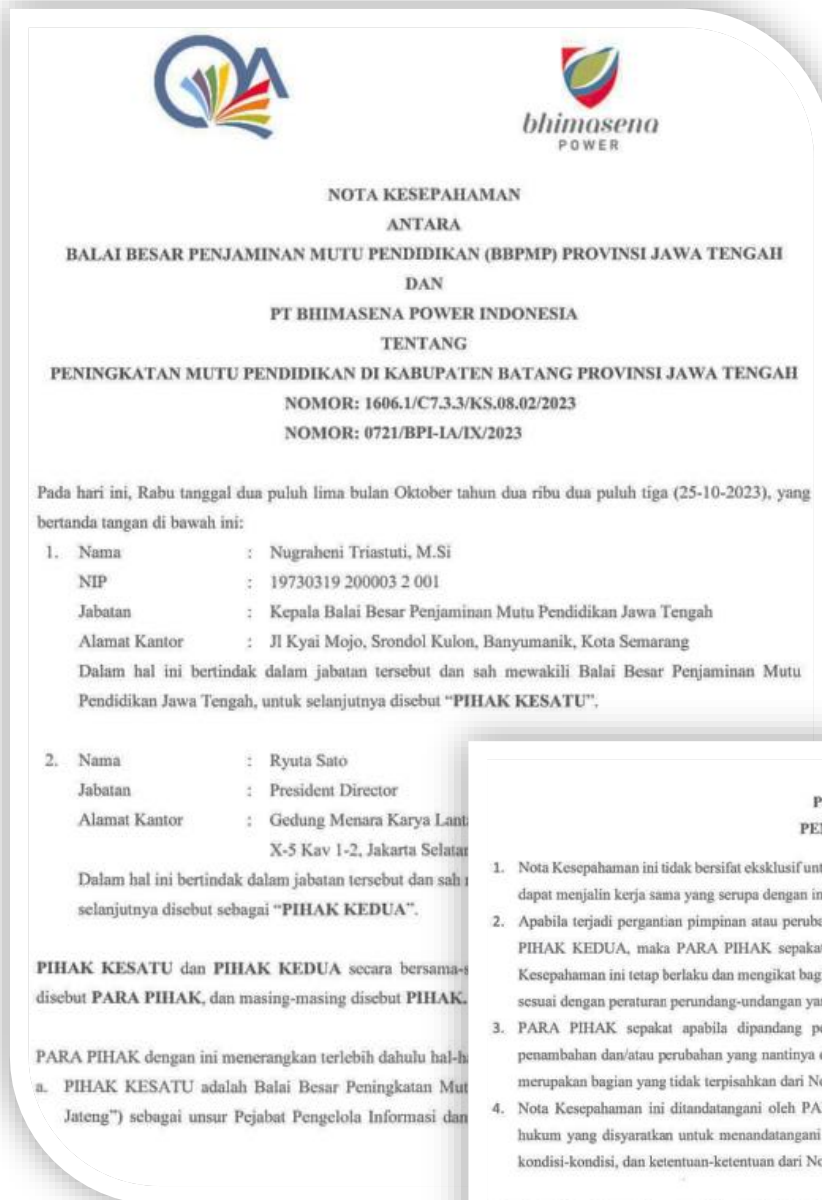
## Daftar Pelaksanan Program *Crosscutting/Collaborative* dengan Mitra Pembangunan Daerah

Tahun 2023

Mitra Pembangunan	Area Pendampingan	Ruang lingkup IKM
1. Tanoto Foundation	Kab. Kendal, Kota Semarang, Purwokerto, Cilacap, <ul style="list-style-type: none"> <li>● satuan pendidikan</li> <li>● pemerintah daerah</li> <li>● komunitas belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● penguatan literasi dan numerasi</li> <li>● penguatan peran kepala satuan pendidikan</li> <li>● pembelajaran berdiferensiasi sesuai tahap perkembangan</li> <li>● penyediaan narasumber</li> <li>● pendampingan menyeluruh implementasi Kurikulum Merdeka</li> </ul>
2. Djarum Foundation	Kab. Kudus: jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK <ul style="list-style-type: none"> <li>● satuan pendidikan</li> <li>● pemerintah daerah</li> <li>● komunitas belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● proyek penguatan profil pelajar Pancasila</li> <li>● penguatan literasi dan numerasi</li> <li>● penguatan peran kepala satuan pendidikan</li> <li>● pembelajaran berdiferensiasi sesuai tahap perkembangan</li> <li>● penyediaan narasumber</li> <li>● pendampingan menyeluruh implementasi Kurikulum Merdeka</li> </ul>
3. Yayasan Desa Taruna Indonesia (SOS Childrens Village)	Kegiatan Asistensi teknis tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lokakarya tentang TPPK kepada anak</li> <li>● Pendampingan penyusunan materi pelatihan</li> <li>● Pendampingan penyusunan instrumen investigasi</li> <li>● Pendampingan penyusunan panduan pelaporan</li> </ul>
4. PT. Bhimasena Power Indonesia	Kabupaten Batang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Kabupaten Batang</li> </ul>

Peran BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program *crosscutting/collaborative* adalah menyediakan sumber daya manusia atau narasumber untuk memberikan materi, pendampingan dan supervisi, serta memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan program. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan anggaran dan peserta yang mengikuti program. Sedangkan mitra pembangunan berperan dalam menyediakan fasilitator dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program *crosscutting/collaborative* adalah adanya peningkatan mutu di satuan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan terimplementasikannya kebijakan program merdeka belajar dari Kemendikbudristek secara optimal.



## Nota Kepahaman Kerjasama Antara BBPMP Jateng dengan PT Bhimasena Power Indonesia



The background features a vibrant, abstract design. It consists of overlapping watercolor-style splashes in shades of teal, green, yellow, orange, pink, and purple. Overlaid on these splashes are numerous thin, parallel diagonal lines that create a textured, grid-like effect. The overall composition is dynamic and colorful.

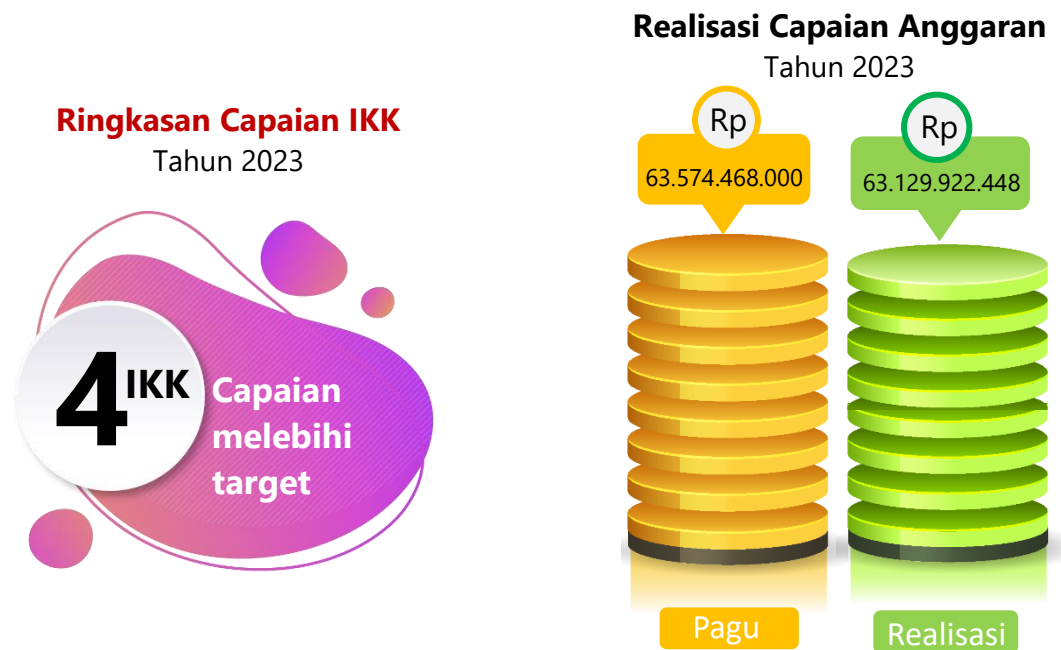
04.

BAB IV  
PENUTUP



BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menetapkan dua sasaran kegiatan, yaitu 1) meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan 2) Meningkatnya tatakelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Dari empat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian dua sasaran kegiatan tersebut, semua indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya telah melebihi target (> 100%) yang ditetapkan.



Dilihat dari capaian *output*, dari total target *output* sebanyak 51.261 lembaga yang difasilitasi berhasil terealisasi sebanyak 63.032 lembaga dengan persentase capaian 123%. Dari segi penyerapan anggaran terealisasi sebesar **Rp63.129.922.448,-** dari total **Rp63.574.468.000,-** dengan persentase **99,30%**.

Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:

1. Jumlah satuan pendidikan yang besar serta geografi wilayah yang sulit dijangkau;
2. Sarana dan prasarana yang kurang dalam mendukung peningkatan literasi dan numerasi;
3. Masih terbatasnya kerjasama antara dinas pendidikan dengan mitra pembangunan dalam kegiatan peningkatan mutu;

4. Keterbatasan jumlah pengawas sekolah dan penilik PAUD dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada;
5. Kompetensi dan kualifikasi SDM PTK jenjang PAUD yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan BBPMP Provinsi Jawa Tengah ke depan antara lain:

1. Advokasi kepada legislatif dan eksekutif di daerah untuk keberlanjutan implementasi kebijakan Merdeka Belajar;
2. Pendampingan pemanfaatan anggaran kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan jenjang PAUD Dikdas, dan Dikmen agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran untuk mendukung peningkatan rapor pendidikan;
3. Advokasi kepada dinas pendidikan untuk pemenuhan rasio jumlah penilik, pengawas dan pemenuhan sarana prasarana untuk peningkatan literasi dan peningkatan mutu pembelajaran jenjang PAUD;
4. *Coaching clinic* dan pendampingan kepada satuan pendidikan dan komunitas belajar dalam implementasi Kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data dan pemanfaatan *platform* sumber daya sekolah;
5. Pendampingan dan fasilitasi kepada satuan pendidikan dan kombel jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen terkait dengan peningkatan pembelajaran di PAUD, dan peningkatan literasi dan numerasi jenjang Dikdas dan Dikmen;
6. Advokasi kepada dinas pendidikan dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kerjasama dengan mitra pembangunan di daerah untuk peningkatan mutu pendidikan.

# 05.

## **LAMPIRAN:**

Perjanjian Kinerja  
Pengukuran Kinerja  
Pernyataan telah direviu

# Perjanjian Kinerja Awal



## Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah Dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Nugraheni Triastuti**

**Jabatan : Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 20 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah,**



**Iwan Syahril**



**Nugraheni Triastuti**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 45.229.709.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 34.090.211.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 79.319.920.000</b>

Semarang, 20 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah,**



**Iwan Syahril**



**Nugraheni Triastuti**

## Perjanjian Kinerja Revisi



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Nugraheni Triastuti**

**Jabatan : Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 14 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah,**



**Iwan Syahril**



**Nugraheni Triastuti**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 38.183.606.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 25.390.862.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 63.574.468.000</b>

Semarang, 14 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah,**



**Iwan Syahril**



**Nugraheni Triastuti**



## Pengukuran Kinerja 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
<b>SK1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>		<b>25.390.862.000</b>		<b>24.997.475.460 98,45</b>			
	IKK1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96		3.14	160%		
	IKK1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas/Dikmen)	30		97.22	324%		
<b>SK2. Meningkatkan tatakelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah</b>		<b>38.133.606.000</b>		<b>38.132.466.988 99,87</b>			
	IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	A		AA	>100%		
	IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA/KL Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	84		97.09	116%		

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Daya Serap
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	38.183.606.000	38.132.446.988	99,87%
2	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	25.390.862.000	24.997.475.460	98,45%
<b>Total Anggaran</b>		<b>63.574.468.000</b>		

Sumber data: <https://spasikita.kemdikbud.go.id/> dan Sumber data <https://mol.kemdikbud.go.id/>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024. ( 7474192 ) - Faksimile 024 ( 7479261 )

Laman : [www.bbpmptateng.kemdikbud.id](http://www.bbpmptateng.kemdikbud.id) Email : [bbpmptateng@kemdikbud.go.id](mailto:bbpmptateng@kemdikbud.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keyakinan keandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Semarang, 25 Januari 2024  
Ketua Tim Reviu

Sudaryanta  
NIP. 197407052003121001



**Kontak kami:**

Telp : 024 7474192

Email : [bbpmpjateng@kemdikbud.go.id](mailto:bbpmpjateng@kemdikbud.go.id)

Website: <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/>

Alamat : Jl. Kyai Mojo, Srandol Kulon, Banyumanik-Semarang